



LAPORAN KINERJA STASIUN KIPM MERAUKE

Tahun 2024



**STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN
MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN MERAUKE**

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

KATA PENGANTAR



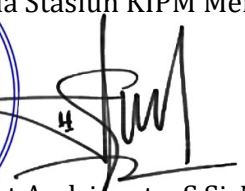
Laporan Kinerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke (LKj) Tahun 2024 disusun sebagai wujud pertanggung jawaban SKIPM Merauke dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Di dalam laporan ini diuraikan informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangkapelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai visi dan misinya.

Landasan penyusunan laporan ini adalah Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi BPPMHKP Tahun 2024. Secara umum, pada Tahun 2024 sebagian besar target indikator kinerja yang ditetapkan telah berhasil dicapai.

Kami berharap laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja BPPMHKP di masa mendatang. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan kinerja ini.



Merauke 22 Januari 2025
Kepala Stasiun KIPM Merauke


Hamet Andriyanto, S.Si., M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Profil Organisasi	2
1.3. Sistematika Penyajian	4
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	5
2.1. Visi dan Misi	5
2.2. Tujuan	6
2.3. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja	6
2.4. Pengukuran Kinerja	10
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	12
3.1. Capaian Kinerja	12
3.2. Analisis dan Evaluasi	16
BAB IV. P E N U T U P	46

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kerja Tahun 2024	12
Tabel 2. Target dan Capaian Kinerja Tahun 2024	14
Tabel 3. Target dan Realisasi IKS 01.01 Tahun 2024.....	19
Tabel 4. Data Sertifikat CPIB Kapal Tahun 2024.....	21
Tabel 5. Target dan Realisasi IKS 01.02 Tahun 2024.....	24
Tabel 6. Data Ruang Lingkup Produk Yang Dijamin Melalui Sertifikasi Sistem HACCP (Produk) SKIPM Merauke Tahun 2024.....	24
Tabel 7. Data Permohonan Sertifikasi Kelayakan ProdukSKIPM Merauke Tahun 2024.....	25
Tabel 8. Data Sertifikat Kelayakan Produk (SKP) SKIPM Merauke Tahun 2024.....	25
Tabel 9. Target dan Realisasi IKS 01.03 Tahun 2024.....	30
Tabel 10. Data Jumlah Sertifikasi Ekspor Tahun 2024	32
Tabel 11. Target dan Realisasi IKS 01.04 Tahun 2024	33
Tabel 12. Target dan Realisasi IKS 02.01 Tahun 2024	37
Tabel 13. Target dan Realisasi IKS 03.01 Tahun 2024	41
Tabel 14. Target dan Realisasi IKS 03.02 Tahun 2024	43
Tabel 15. Target dan Realisasi IKS 03.03 Tahun 2024	47
Tabel 16. Target dan Realisasi IKS 03.04 Tahun 2024	47
Tabel 17. Target dan Realisasi IKS 03.05 Tahun 2024	49
Tabel 18. Target dan Realisasi IKS 03.06 Tahun 2024	53
Tabel 19. Target dan Realisasi IKS 03.07 Tahun 2024	57
Tabel 20. Target dan Realisasi IKS 03.08 Tahun 2024	59
Tabel 21. Target dan Realisasi IKS 03.09 Tahun 2024	62
Tabel 22. Target dan Realisasi IKS 03.10 Tahun 2024	65
Tabel 23. Data Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan.....	67
Tabel 24. Data PNS Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan.....	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Struktur Organisasi Stasiun KIPM Merauke	3
Gambar 2.1.	Peta Sasaran Strategis SKIPM Merauke Tahun 2024	7
Gambar 3.1.	Dashboard Nilai Pencapaian Sasaran Strategis pada Aplikasi Kinerjaku KKP Tahun 2024	11
Gambar 3.3.	Sertifikat CPIB atas nama UD. Cahaya A.....	27
Gambar 3.4.	Sertifikat CPIB atas nama UD. Putra.....	28
Gambar 3.5.	Nilai SKM Stasiun KIPM Merauke Tahun 2024 padae-survey SKM BPPMHKP	35

Secara umum, SKIPM Merauke telah berhasil melaksanakan misi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam mendukung pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan tahun 2024. Keberhasilan ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis (SS) dan indikator kinerja (IK) yang telah ditetapkan.

Pada periode triwulan IV terdapat perubahan dokumen perjanjian kinerja SKIPM Merauke berdasarkan cascading kinerja unit eselon I BPPMHKP. Hal ini sesuai dengan perubahan susunan organisasi serta tugas dan fungsi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, yang terdiri atas :

- a. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
- b. Pusat Manajemen Mutu;
- c. Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer;
- d. Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

Dari seluruh indikator kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan Perjanjian Kerja SKIPM Merauke tahun 2024, seluruhnya memenuhi dan melebihi target yang telah ditetapkan. Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) SKIPM Merauke hingga akhir tahun 2024 adalah sebesar 114, 61 %. Berdasarkan hasil pengukuran melalui aplikasi kinerjajaku dengan sasaran strategis sebanyak 3 sasaran dan terdiri dari 15 indikator kinerja masuk dalam kategori istimewa (berwarna biru). Dari seluruh indikator kinerja yang dimiliki telah tercapai sesuai dengan target dan atau melebihi target yang ditetapkan, dengan perhitungan nilai posisi akhir. Nilai NPSS tersebut ditunjukkan dari pencapaian sasaran strategis (SS) dan target Indikator Kinerja SKIPM Merauke sampai akhir periode tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian sasaran strategis “Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan” dengan beberapa indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu Dan Keamanan Pangan Lingkup UPT SKIPM Merauke dengan target tahunan 2024 sebesar 70 % sampai dengan akhir tahun 2024 triwulan IV telah tercapai sebesar 100 %.
 - b. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT SKIPM Merauke dengan target tahunan 2024 sebesar 70 % sampai dengan akhir tahun 2024 triwulan IV telah tercapai sebesar 106,66 %.
 - c. Persentase Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Di Wilayah RI Lingkup UPT SKIPM Merauke dengan target tahunan 2024 sebesar 70 % sampai dengan akhir tahun 2024 triwulan IV telah tercapai sebesar 100 %.

- d. Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT SKIPM Merauke target tahunan 2024 sebesar 99 % sampai dengan akhir tahun 2024 triwulan IV telah tercapai sebesar 100 %.
2. Pencapaian sasaran strategis “Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Yang Konsisten Sesuai Standar” dengan beberapa indikator kinerja sebagai berikut :
 - a. Nilai Pemenuhan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Penguji dan Lembaga Inspeksi Lingkup UPT SKIPM Merauke dapat tercapai melebihi target sebesar 83,10 % dari target 70 %.
3. Pencapaian sasaran strategis “Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Stasiun KIPM Merauke” dengan beberapa indikator kinerja sebagai berikut :
 - a. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan UPT SKIPM Merauke dari target sebesar 3,36 telah tercapai sebesar 3,66 yang setara dengan persentase 108,93 %;
 - b. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT SKIPM Merauke dari target sebesar 86 telah tercapai sebesar 91,94 yang setara dengan persentase 106,91 %;
 - c. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT SKIPM Merauke dari target sebesar 82 telah tercapai sebesar 85,50 yang setara dengan persentase 104,27 %;
 - d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT SKIPM Merauke dari target sebesar 71 telah tercapai sebesar 92,50 yang setara dengan persentase 120 %;
 - e. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT SKIPM Merauke dari target sebesar 93,76 telah tercapai sebesar 98,41 atau sebesar yang setara dengan persentase 104,96 %;
 - f. Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT SKIPM Merauke dari target sebesar 100 % telah tercapai sebesar 100 % atau sebesar yang setara dengan persentase 100 %;
 - g. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT SKIPM Merauke dari target sebesar 80 % telah tercapai sebesar 100 % atau sebesar yang setara dengan persentase 120 %;
 - h. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup UPT SKIPM Merauke dari target sebesar 80 % telah tercapai sebesar 84,34 % atau sebesar yang setara dengan persentase 105,43 %;
 - i. Tingkat Kepatuhan BMN Lingkup UPT SKIPM Merauke dari target sebesar 80 % telah tercapai sebesar 97,50 % atau sebesar yang setara dengan persentase 120 %;

Realisasi anggaran SKIPM Merauke sampai dengan akhir tahun 2024 sebesar Rp. **4,665,498,619,-** atau mencapai 99,28 % dari alokasi anggaran tersedia sebesar Rp. **4,699,197,000,-**. Realisasi anggaran tersebut dilaksanakan pada Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Dukungan Manajemen.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Stasiun KIPM Merauke dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif, efisien dan terpercaya sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan kinerja ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Stasiun KIPM Merauke dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2024 untuk mencapai visi dan misi BPPMHKP. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap satuan kerja di lingkungan Stasiun KIPM Merauke serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholder* demi perbaikan kinerja Stasiun KIPM Merauke.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

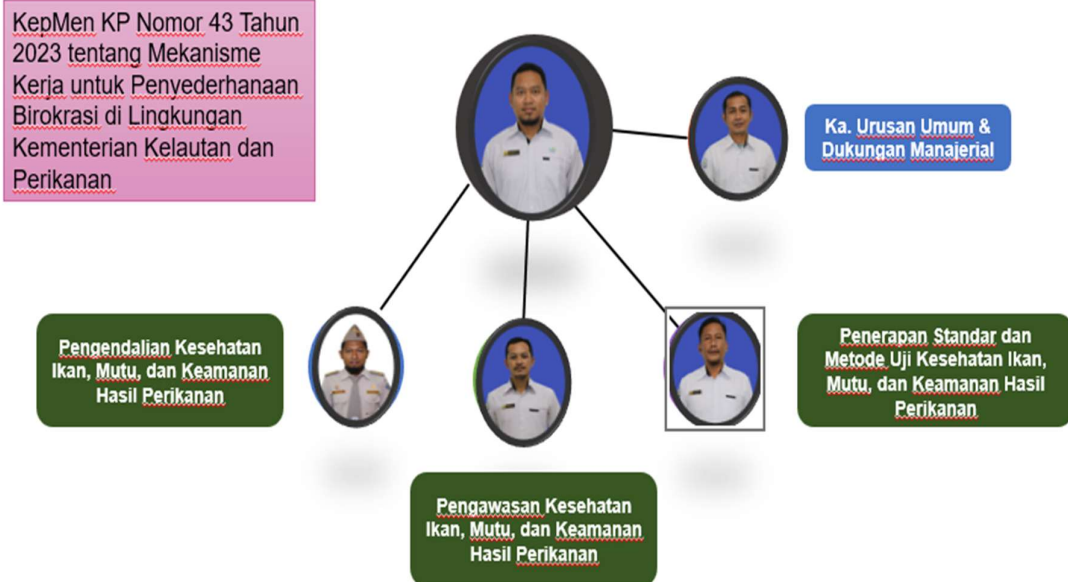
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPPMHKP mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPPMHKP menyelenggarakan fungsi: a) penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program perkarantina ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan; b) pelaksanaan perkarantina ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan; c) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantina ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan; d) pelaksanaan administrasi Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan; dan e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Stasiun KIPM Merauke mempunyai tugas melaksanakan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan serta penerapan sistem manajemen mutu. Di dalam melaksanakan tugas tersebut, Stasiun KIPM Merauke menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- Meningkatkan daya saing hasil kelautan dan perikanan melalui inspeksi, sertifikasi, surveilans, pengambilan contoh uji, pengujian dan monitoring.
- Meningkatkan penerapan praktik yang baik di setiap rantai pasok dan kepatuhan terhadap pemenuhan standar mutu hasil kelautan dan perikanan.
- Mewujudkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang efektif dan selaras dengan standar internasional.
- Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Dalam menjalankan tugasnya, pada awal tahun Tahun 2024 Stasiun KIPM Merauke mempunyai pegawai atau sumber daya manusia sebanyak 13 (Tiga Belas) orang pegawai baik teknis maupun administrasi yang cukup kompeten dan memadai. Bagan struktur organisasi Stasiun KIPM Merauke dapat dilihat dalam Gambar 1.1 di bawah ini.

Ketua Tim Kerja SKIPM Merauke



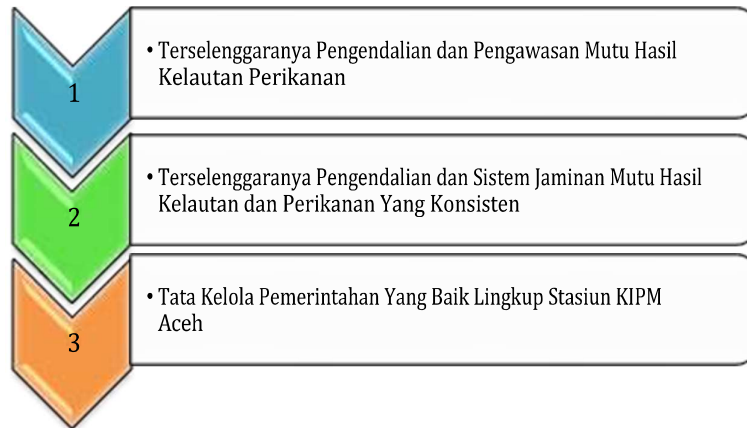
Gambar 1.1. Struktur Organisasi Stasiun KIPM Merauke

1.3 Sistematika dan Penyajian

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur

Peta strategi, sasaran dan indikator kinerja Stasiun KIPM Merauke Tahun 2024 ditunjukkan pada Gambar 1.2 dan Tabel 1.1 di bawah ini

**Tabel 1.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja SKIPM H
MERAUKE Tahun 2024**



SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	
				2024	TW I
Kegiatan 1. Pengendalian Mutu					
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif	1	Jumlah Sertifikat CPIB Suplier Yang Diterbitkan (Sertifikat)	5	2
		2	Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik (Lokasi)	1	1
		3	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT BPPMHKP Merauke (Produk)	3	0
		4	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup UPT BPPMHKP Merauke (UPI)	4	1
		5	UPI Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang Menerapkan Sistem Treceability (UPI)	2	-

Kegiatan 2. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan					
SK3.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	6	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik Di UPT UPT BPPMHKP Merauke (Nilai)	84	89,92
		7	Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Mutu Integrasi (Lembaga)	1	-
		8	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup UPT BPPMHKP Merauke (Lokasi)	1	-
KEGIATAN 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPMHKP					
SK4.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP	9	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPPMHKP Merauke (Indeks)	84	-
		10	Nilai Rekonsiliasi kinerja lingkup BPPMHKP Merauke (Nilai)	85	-
		11	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Lingkup BPPMHKP Merauke (%)	100	-
		12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPMHKP Merauke (%)	80	100
		13	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BPPMHKP Merauke (Nilai)	93,76	89,16
		14	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BPPMHKP Merauke (Nilai)	86	-
		15	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup BPPMHKP Merauke (%)	80	-
		16	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BPPMHKP Merauke (%)	80	-

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Visi dan Misi

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan misi, yakni ***“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan”***. Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, maka BPPMHKP menjalankan 3 (tiga) dari 4 (empat) Misi KKP dalam Renstra 2020-2024, yaitu:

1. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
2. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
3. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan produk perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan peningkatan nilai tambah, pengembangan industri perikanan hulu-hilir untuk meningkatkan daya saing, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di KKP.

2.2. Tujuan

Tujuan pembangunan BPPMHKP merupakan penjabaran dari visi dan misi guna mendukung prioritas pembangunan kelautan dan perikanan. Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024, telah menetapkan 4 (empat) tujuan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Stasiun KIPM Merauke sebagai UPT BPPMHKP bertanggung jawab pada pencapaian 4 (empat) tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu :

1. Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan
2. Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu-hilir melalui standardisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan
3. Meningkatnya pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang integratif, serta;
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di Stasiun KIPM Merauke.

2.3. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada Tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur..

Peta strategi, sasaran dan indikator kinerja Stasiun KIPM Merauke Tahun 2024 ditunjukkan pada Gambar 2.1. di bawah ini :



Gambar 2.1. Peta Sasaran Strategis SKIPM Merauke Tahun 2024

Peta strategis Stasiun KIPM Merauke tersebut selanjutnya diturunkan ke dalam indikator dan target kinerja yang akan dicapai selama Tahun Anggaran 2024 baik dalam satu tahun sekaligus maupun setiap bulannya. Metode penjabaran peta strategis ke dalam indikator kinerja menggunakan metode cascading, dari eselon IV ke Pelaksana Koordinator hingga seluruh pegawai Seluruh KIPM Merauke. Dengan proses cascading tersebut maka strategi organisasi didukung oleh seluruh unit dan pegawai Stasiun KIPM Merauke dalam setiap level. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (outcome). Pencapaian indikator kinerja yang sudah ditetapkan adalah suatu bentuk keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis sebagaimana yang telah direncanakan. Target kinerja Stasiun KIPM Merauke Tahun 2024 yang berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan targetnya, telah dirinci ke dalam masing-masing perspektif sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1. Indikator Kinerja dan Target Kinerja SKIPM Merauke Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke (%)	70
		2.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke (%)	70
		3.	Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke(%)	70
		4.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke(%)	99
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5.	Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi lingkup Stasiun KIPM Merauke(%)	70
		6.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Stasiun KIPM Merauke (Nilai indeks)	3,36
SK.3	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan BPPMHKP	7.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke (Nilai indeks)	86
		8.	Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke (Nilai)	82
		9.	Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke (%)	100
		10.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke (%)	80
		11.	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke (Inovasi)	1
		12.	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke (Nilai)	93,76
		13.	Nilai Perencanaan Kinerja Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke (Nilai)	71
		14.	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke (%)	80
		15.	Tingkat kepatuhan BMN lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke (%)	80

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	TARGET TW IV / TAHUN 2024	CAPAIAN SD TW IV / TAHUN 2024
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke (%)	70	70	100
		2.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke (%)	70	70	100
		3.	Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke(%)	70	70	100
		4.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke(%)	99	99	100
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5.	Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi lingkup Stasiun KIPM Merauke(%)	70	70	83.10
		6.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Stasiun KIPM Merauke (Nilai indeks)	3,36	3,36	96.08
SK.3	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan BPPMHKP	7.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke (Nilai indeks)	86	86	85.94
		8.	Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke (Nilai)	82	82	77.25
		9.	Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke (%)	100	100	100
		10.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke (%)	80	80	93.51
		11	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke (Inovasi)	1	1	1
		.12	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran	93,76	93,76	93,51

			(IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke (Nilai)			
		13	Nilai Perencanaan Kinerja Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke (Nilai)	71	71	93,51
		14	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke (%)	80	80	84.34
		15	Tingkat kepatuhan BMN lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke (%)	80	80	97.50

2.4. Pengukuran Kinerja

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku, yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:

a) *Polarisasi Maximize*

Pada polarisasi maximize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dengan formula :

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$$

b) *Polarisasi Minimize*

Pada polarisasi minimize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \{(1 + (1 - \text{Realisasi} / \text{Target}))\} \times 100\%$$

c) *Polarisasi Stabilize*

Pada polarisasi stabilize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.

4. Status indeks capaian IKU adalah sebagai berikut

SANGAT KURANG	KURANG	CUKUP	BAIK
≤ 50	50 – <70	70 – <90	90 – 120

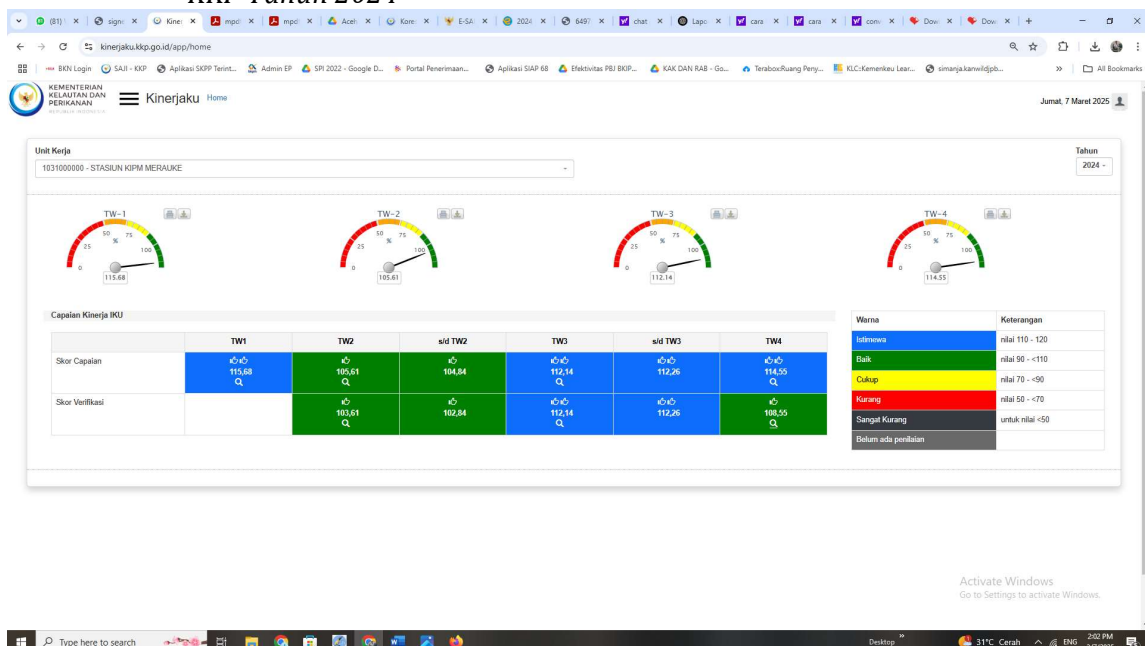
BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Secara umum, target-target kinerja pada Tahun 2024 telah tercapai. Berdasarkan dashboard sistem aplikasi pengelolaan kinerja di www.kinerjaku.kkp.go.id, Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Stasiun KIPM Merauke sebesar 107% (kategori Baik). Nilai pencapaian sasaran strategis tersebut diperoleh dari pencapaian indikator kinerja pada setiap sasaran strategis berdasarkan target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja selama satu tahun. Capaian kinerja tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi sekaligus keberhasilan dalam melaksanakan target kinerja program karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan BPPMHKP dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Stasiun KIPM Merauke Tahun 2024 untuk setiap sasaran strategis dalam dashboard sistem aplikasi pengelolaan kinerja KKP.

Gambar 3.1. Dashboard Nilai Pencapaian Sasaran Strategis pada Aplikasi Kinerjaku KKP Tahun 2024



NPSS tersebut merupakan kompilasi nilai dari hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja untuk setiap sasaran strategis organisasi. Pengukuran pencapaian indikator kinerja dilakukan melalui identifikasi peran dan tanggung jawab setiap tingkat manajemen dalam organisasi untuk kemudian dianalisis upaya pencapaian target kinerja unit kerja yang bersangkutan dibandingkan dengan indikator yang telah disepakati sebelumnya. Ringkasan capaian indikator kinerja Stasiun KIPM Merauke Tahun 2024 disajikan pada Tabel 3.1

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Stasiun KIPM Merauke Tahun 2024

LAPORAN CAPAIAN KINERJA BULAN DESEMBER												
TAHUN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA UNIT KERJA NKO		2024 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN STASIUN KIPM MERAUKE 114.55%										
Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2024	Target DESEMBER	Capaian DESEMBER	%	Target s/d DESEMBER	Capaian s/d DESEMBER	%	Tgl Input
S.01	Terselenggaranya Pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan											
IKS.01.01	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	70,00	70,00	100,00	120,00	70,00	100,00	120,00	1/15/2025 22:34
IKS.01.02	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	70,00	70,00	100,00	120,00	70,00	100,00	120,00	1/15/2025 22:34
IKS.01.03	Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	70,00	70,00	100,00	120,00	70,00	100,00	120,00	1/15/2025 22:34
IKS.01.04	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	99,00	99,00	100,00	101,01	99,00	100,00	101,01	1/15/2025 22:34
S.02	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar											
IKS.02.01	Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan lembaga inspeksi lingkup Stasiun KIPM Merauke	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	70,00	70,00	100,00	120,00	70,00	100,00	120,00	1/15/2025 22:34
S.03	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM											
IKS.03.01	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke	Inovasi	Maximize	Nilai Posisi Akhir	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	1/15/2025 22:34
IKS.03.02	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Stasiun KIPM Merauke	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	3,36	3,36	96,08	120,00	3,36	96,08	120,00	1/15/2025 22:34
IKS.03.03	Indeks "PROSAVING" "KSN" lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	86,00	86,00	85,94	99,93	86,00	85,94	99,93	1/15/2025 22:34
IKS.03.04	Nilai penilaian mandiri SAKP lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke	Nilai	Maximize	Akumulasi	82,00	82,00	77,25	94,21	82,00	77,25	94,21	1/15/2025 22:34
IKS.03.05	Nilai Kinerja Pencapaian Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke	Nilai	Maximize	Akumulasi	71,00	71,00	93,51	120,00	71,00	117,90	120,00	1/15/2025 22:34
IKS.03.06	Nilai Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	93,76	93,76	93,51	99,73	93,76	93,51	99,73	1/15/2025 22:34
IKS.03.07	Pemenuhan target BKR lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke	Persen	Maximize	Akumulasi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1/15/2025 22:34
IKS.03.08	Persentase rekomendasi hasil pengendalian yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80,00	80,00	93,51	116,89	80,00	93,51	116,89	1/15/2025 22:34
IKS.03.09	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke	Persen	Maximize	Akumulasi	80,00	80,00	84,34	105,43	80,00	84,34	105,43	1/15/2025 22:34
IKS.03.10	Tingkat kepatuhan BWN lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke	Persen	Maximize	Akumulasi	80,00	80,00	97,50	120,00	80,00	97,50	120,00	1/15/2025 22:34

Tabel. 3

Target dan Realisasi IKS 01.01 Tahun 2024

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2024						Renstra 2020-2024	
		2019	2020	2021	2022	2023	Realisasi Periode Sebelumnya	Target	Realisasi	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	%
1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu Dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke (%)	-	-	-	-	-	-	70	100	120	70	120	70	120

1. Capaian Indikator Kinerja

Pengukuran capaian indikator kinerja Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu Dan Keamanan Pangan Lingkup UPT SKIPM Merauke dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\% X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$$

A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB

B = Persentase Unit menerapkan CPIB

C = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB

D = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB

F = Persentase Unit Usaha menerapkan CPIB Kapal; xn = Jumlah dari unsur pembentuk. xn =

Jumlah dari unsur pembentuk (6)*

*) Komponen pembentuk yang dihitung berdasarkan karakteristik sertifikasi jaminan mutu sektor produksi primer yg ada UPT

Perhitungan setiap unsur terlebih dahulu dilakukan masing-masing dengan membandingkan jumlah permohonan masuk dari setiap jenis layanan sertifikasi jaminan mutu sektor produksi primer dibagi dengan jumlah sertifikat yang diterbitkan dari layanan tersebut.

1. A = CBIB

- Permohonan Sertifikat CBIB Tahun 2024 = 0
- Sertifikat CBIB Yang Diterbitkan Tahun 2024 = 0
- Persentase Capaian CBIB : $(A) = \frac{0}{0} \times 100\% = 100\%$

2. B = CPIB

- Permohonan Sertifikat CPIB Tahun 2024 = 0
- Sertifikat CPIB Yang Diterbitkan Tahun 2024 = 0
- Persentase Capaian CPIB : $(B) = \frac{0}{0} \times 100 \% = 100 \%$

3. C = CPPIB

- Permohonan Sertifikat CPPIB Tahun 2024 = 0
- Sertifikat CPPIB Diterbitkan Tahun 2024 = 0
- Persentase Capaian CPIB : $(C) = \frac{0}{0} \times 100 \% = 100 \%$

4. D = CPOIB

- Permohonan Sertifikat CPOIB Tahun 2024 = 0
- Sertifikat CPOIB Diterbitkan Tahun 2024 = 0
- Persentase Capaian CPOIB : $(D) = \frac{0}{0} \times 100 \% = 100 \%$

5. E = CDOIB

- Permohonan Sertifikat CDOIB Tahun 2024 = 0
- Sertifikat CDOIB Diterbitkan Tahun 2024 = 0
- Persentase Capaian CDOIB : $(E) = \frac{0}{0} \times 100 \% = 100 \%$

6. F = CBIB Kapal

- Permohonan Sertifikat CPIB Kapal Tahun 2024 = 16
- Sertifikat CPIB Kapal Yang Diterbitkan Tahun 2024 = 16 (Berdasarkan Sertifikat CPIB Kapal Di Lokasi Provinsi Merauke Terlampir)
- Persentase Capaian CPIB Kapal : $(F) = \frac{16}{16} \times 100 \% = 100 \%$

$$\% X = \frac{100+100+100+100+100+100}{6} \times 100\%$$

$$\% X = 100\%$$

Capaian indikator kinerja Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu Dan Keamanan Pangan Lingkup UPT SKIPM Merauke Tahun 2024 sebesar 100 %.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Indikator kinerja ini merupakan indikator baru setelah BPPMHKP dibentuk. Berdasarkan data pada aplikasi kinerjajaku, capaian indikator kinerja Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu Dan Keamanan Pangan Lingkup UPT SKIPM Merauke adalah sebesar 100 %.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Perbandingan capaian Indikator kinerja Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu Dan Keamanan Pangan Lingkup UPT SKIPM Merauke dengan target yang terdapat pada dokumen Renstra telah melebihi target yang ditetapkan, yaitu dengan efektifitas pelaksanaan sebesar 120 %.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Upaya yang dilakukan oleh SKIPM Merauke dalam mencapai keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah dengan melakukan update informasi dan referensi pelaksanaan kegiatan secara berkala. Pada masa transisi SOTK sampai dengan saat ini, diharapkan dengan kerja sama seluruh sumber daya yang ada dan koordinasi dengan stakeholder terkait dapat meminimalisir kegagalan pencapaian indikator kinerja.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada kegiatan ini yaitu dengan melakukan efisiensi jumlah personil yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya serta dukungan personil non PNS. Serta terdapat rencana penggunaan teknologi atau media informasi untuk mengakomodir kebutuhan pelaksanaan kegiatan.

6. Realisasi Anggaran

Dari sisi anggaran, indikator kinerja Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu Dan Keamanan Pangan Lingkup UPT SKIPM Merauke Tahun 2024 didukung dengan pagu anggaran kegiatan sebesar Rp. 140.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 139.940.724,- atau setara dengan 99,96 %.

7. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana aksi yang dilakukan untuk mendukung indikator kinerja ini dengan melaksanakan inspeksi, melakukan pengambilan dan pengujian contoh, dan melaksanakan survailen pada sertifikasi mutu produksi sumber daya kelautan, penangkapan ikan, dan pembudidayaan ikan atau peraturan terkait kepada pengguna jasa, melaksanakan program yang telah direncanakan, koordinasi dan kerjasama antara petugas atau inspektur mutu dan/atau tim pusat serta unit pelaksana teknis eselon I terkait.

Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI);
2. Standar Internasional (Codex Alimentarius);
3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah maupun secara manual. Berikut formula perhitungan indikator kinerja ini :

$$\% X = \frac{A+B}{xn} \times 100\%$$

A = Presentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk

B = Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMP/SSOP

xn = Jumlah dari unsur pembentuk

1. Capaian Indikator Kinerja

Tabel. 5

Target dan Realisasi IKS 01.02 Tahun 2024

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2024						Renstra 2020-2024	
		2019	2020	2021	2022	2023	Realisasi Periode Sebelumnya	Target	Realisasi	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	%
1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke (%)	-	-	-	-	-	-	70	106,66	120	70	120	70	120

Sampai dengan akhir periode tahun 2024, rekomendasi HACCP yang diterbitkan di SKIPM Merauke sebanyak 3 produk dari total target tahunan sejumlah 1 rekomendasi pada tahun 2024, yang terdiri dari penerbitan baru dan monev sebagaimana data capaian ruang lingkup HACCP adalah termasuk kegiatan inspeksi dan monev HACCP sebagaimana terlampir.

Sedangkan terkait layanan sertifikasi Sertifikat Kelayakan Produk (SKP), yang menjadi tugas baru yang dilaksanakan oleh SKIPM Merauke Tahun 2024 tercatat terdapat 1 permohonan dan jumlah sertifikat SKP yang diterbitkan sebanyak 1 sertifikat, seperti data dibawah ini.

Tabel. 7

Data Permohonan Sertifikasi Kelayakan Produk SKIPM Merauke Tahun 2024

NO	NAMA UPI	ALAMAT	RUANG LINGKUP
1	CV. BINTANG FAHRI INTERNASIONAL	Jl. Alafura Duti Kelurahan Samkai, Kecam.tan Merauke, KabuPaten Merauke, Papua - Indonesia	Dried Fish Mrlv
2	CV. BINTANG FAHRI INTERNASIONAL	Jl. Alafura Duti Kelurahan Samkai, Kecam.tan Merauke, KabuPaten Merauke, Papua - Indonesia	Dried Shark
3	PT. PERIKANAN INDONESIA UNIT MERAUKE	Jalan Sisinga Mangaraja Ujung Komplek PPS Desa/Kelurahan Lampulo, Kec. Kuta Alam, Kota banda Merauke, Provinsi Merauke	Frozen Demersal Fish

Tabel. 8
Data Sertifikat Kelayakan Produk (SKP)
SKIPM Merauke Tahun 2024

NO	NOMOR SKP	NOMOR PBUMKU	NAMA UPI	ALAMAT	RUANG LINGKUP	TANGGAL	BERLAKU SAMPAI	PERINGKAT
1	34900/93/SKP/KR/XII/2024	PB-UJMKU: 022020020004300030001	PT. LIMINDO INTI MARINE	Jalan Menara Binaloka, Kel. Samkai, Kec. Merauke, Kabupaten Merauke, Papua Selatan	Dried Shark Fin	20 Desember 2024	20 Desember 2026	C

Perhitungan setiap unsur terlebih dahulu dilakukan masing-masing dengan membandingkan jumlah target atau permohonan dari setiap jenis layanan sertifikasi sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT SKIPM Merauke dibagi dengan jumlah sertifikat yang memenuhi persyaratan dan atau diterbitkan dari layanan tersebut. Berikut perhitungan indikator kinerja tersebut :

1. A = HACCP

- Target HACCP Tahun 2024 = 30
- Capaian HACCP Tahun 2024 = 34
- Persentase Capaian HACCP : $(A) = \frac{34}{30} \times 100 \% = 113,33 \%$

2. B = SKP

- Permohonan SKP Tahun 2024 = 3
- SKP Yang Diterbitkan Tahun 2024 = 3
- Persentase Capaian SKP : $(B) = \frac{3}{3} \times 100 \% = 100 \%$

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT SKIPM Merauke Tahun 2024 sebagai berikut :

$$\% X = \frac{113,33+100}{2} \times 100 \%$$

$$\% X = 106,66 \%$$

2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Sesuai dengan data kinerja, capaian indikator kinerja Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT SKIPM Merauke tidak dapat diperbandingkan secara langsung, karena salah satu unsur pembentuk yaitu Sertifikat Kelayakan Produk tahun sebelumnya belum dilaksanakan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Perbandingan capaian Indikator kinerja Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT SKIPM Merauke dengan target yang terdapat pada dokumen Renstra telah diupayakan sebaik baiknya sesuai dengan target yang ditetapkan, yaitu sebesar 106,66 %.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Secara umum Indikator kinerja Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT SKIPM Merauke telah melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2024. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja diharapkan dapat terwujud dengan penerapan rencana aksi dan dukungan pihak-pihak terkait.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada pelaksanaan indikator kinerja Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT SKIPM Merauke, berupa efisiensi jumlah personil yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya. Serta terdapat penggunaan teknologi atau media informasi untuk mengakomodir kebutuhan pelaksanaan kegiatan, baik pada kegiatan inspeksi dan verifikasi maupun monitoring dan evaluasi.

6. Realisasi Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran, indikator kinerja Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT SKIPM Merauke melalui anggaran Sertifikasi Produk sebesar Rp. 38.100.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 38.037.935,- atau senilai 99,84 %.

7. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana aksi yang dilaksanakan dalam rangka mendukung indikator kinerja kinerja Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT SKIPM Merauke diantaranya yaitu : melakukan inventarisasi masa berlaku HACCP dan SKP semua UPI; membuat program terkait *schedule* perpanjangan sertifikat HACCP; melakukan update data-data terkait; meningkatkan kapasitas SDM; serta meningkatkan koordinasi dan sosialisasi dengan pihak UPI. Berikut data target dan realisasi indikator kinerja ini.

1. IKS. 01.01 Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu Dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CBIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya. Output kegiatan berupa rekomendasi yang diberikan dari hasil inspeksi dalam sistem OSS maupun secara manual.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI)
2. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku

1. Capaian Indikator Kinerja

Monitoring penjaminan mutu perikanan domestik terus dilaksanakan oleh SKIPM Merauke. Pada tahun 2024 dilakukan monitoring penjaminan mutu perikanan domestik dalam bentuk kegiatan “Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di Sentra Penyedia Pangan Sehat di pasar domestik yang berlokasi di Kabupaten Merauke Sentra penyedia pangan sehat yang menjadi lokus adalah pasar dan pelabuhan perikanan. Lokasi pelaksanaan implementasi Inpres Nomor 01 Tahun 2017 dengan lokasi pelaksanaan di 1 (satu) kabupaten/kota, yaitu Kota Merauke dengan lokus Pasar Wamanggo dan sedangkan untuk Kabupaten Merauke dengan lokus Pasar Wamanggo. Kegiatan ini dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun atau dengan periode pelaporan pada tiap semester. Berikut target, perhitungan dan realisasi indikator kinerja beserta dokumentasi kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan domestik SKIPM Merauke Tahun 2024 :

$$\% X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$$

A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB

B = Persentase Unit menerapkan CPIB

C = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB

D = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB

F = Persentase Unit Usaha menerapkan CPIB Kapal; xn = Jumlah dari unsur pembentuk. xn = Jumlah dari unsur pembentuk (6)*

*) Komponen pembentuk yang dihitung berdasarkan karakteristik sertifikasi jaminan mutu sektor produksi primer yg ada UPT

Perhitungan setiap unsur terlebih dahulu dilakukan masing-masing dengan membandingkan jumlah permohonan masuk dari setiap jenis layanan sertifikasi jaminan mutu sektor produksi primer dibagi dengan jumlah sertifikat yang diterbitkan dari layanan tersebut.

1 A = CBIB

- Permohonan Sertifikat CBIB Tahun 2024 = 0
- Sertifikat CBIB Yang Diterbitkan Tahun 2024 = 0
- Persentase Capaian CBIB : $(A) = 0 \times 100 \% = 100 \%$

2. B = CPIB

Permohonan Sertifikat CPIB Tahun 2024 = 0

Sertifikat CPIB Yang Diterbitkan Tahun 2024 = 0

Persentase Capaian CPIB : $(B) = 0 \times 100 \% = 100 \%$

3. C = CPPIB

Permohonan Sertifikat CPPIB Tahun 2024 = 0

Sertifikat CPPIB Diterbitkan Tahun 2024 = 0

Persentase Capaian CPIB : $(C) = 0 \times 100 \% = 100 \%$

4. D = CPOIB

Permohonan Sertifikat CPOIB Tahun 2024 = 0

Sertifikat CPOIB Diterbitkan Tahun 2024 = 0

Persentase Capaian CPOIB : $(D) = 0 \times 100 \% = 100 \%$

5. E = CDOIB

Permohonan Sertifikat CDOIB Tahun 2024 = 0

Sertifikat CDOIB Diterbitkan Tahun 2024 = 0

Persentase Capaian CDOIB : $(E) = 0 \times 100 \% = 100 \%$

6. F = CBIB Kapal

Permohonan Sertifikat CPIB Kapal Tahun 2024 = 0

Persentase Capaian CPIB Kapal : $(F) = 0 \times 100 \% = 100 \%$

Tabel. 9
Target dan Realisasi IKS 01.03 Tahun 2024

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2024						Renstra 2020-2024	
		2019	2020	2021	2022	2023	Realisasi Periode Sebelumnya	Target	Realisasi	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	%
1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu Dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke	-	-	-	-	-	-	70	100	100	70	120	70	120

7. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Indikator kinerja pada periode sebelumnya menggunakan satuan lokasi dan cara perhitungan yang berbeda dengan periode tahun 2024. Berdasarkan tabel data realisasi indikator kinerja ini serta data pada kinerja pada tahun 2023, periode yang sama, terdapat capaian 2 kabupaten/kota yang menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik. Jika diperbandingkan dengan data tahun 2024 persentase capaian 100 % merupakan capaian di 2 lokasi kabupaten/kota sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

8. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Perbandingan capaian Indikator kinerja Persentase Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup UPT SKIPM Merauke yang terdapat pada dokumen Renstra telah sesuai dengan target yang ditetapkan, yaitu dengan efektifitas pelaksanaan sebesar 100 %.

9. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Secara umum indikator kinerja Persentase Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup UPT SKIPM Merauke telah sesuai dengan target dan rencana yang telah ditetapkan. Terdapat hasil evaluasi yang mengharuskan SKIPM Merauke melakukan beberapa langkah perbaikan. Perlu peningkatan pemahaman terkait Keputusan Kepala BKIPM Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Juknis Pengendalian Mutu Dlm Rangka Penyediaan Pangan Sehat, sebagai acuan pelaksanaan kegiatan. SKIPM Merauke berusaha dan berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dari indikator ini baik dari segi kualitas dan kuantitas dengan dukungan dari pihak-pihak terkait.

10. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada kegiatan ini yaitu dengan melibatkan personil tambahan non teknis dengan pengalaman yang cukup, serta dengan persiapan untuk memberikan penjelasan kepada seluruh personil.

11. Realisasi Anggaran

Dari sisi anggaran, indikator kinerja Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik Tahun 2024 didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 45.663.855,- atau setara dengan 91,33 %.

12. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana aksi yang dilakukan untuk mendukung indikator kinerja Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik adalah dengan peningkatan pemahaman terkait Keputusan Kepala BKIPM Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Juknis Pengendalian Mutu Dlm Rangka Penyediaan Pangan Sehat, koordinasi dan rapat evaluasi dan persiapan pelaksanaan periode selanjutnya.

2. IKS. 01.02 Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI);
2. Standar Internasional (Codex Alimentarius);
3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah maupun secara manual. Berikut formula perhitungan indikator kinerja ini :

$$x = \frac{A-B}{A} \times 100 \%$$

x = Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)

A = HC yang diterbitkan oleh BPPMHKP

B = Jumlah HC yang ditolak oleh negara tujuan

1. Capaian Indikator Kinerja

Pada tahun 2024 indikator kinerja Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT SKIPM Merauke telah ditentukan target dan periodenya. Pada periode tahun 2024, indikator kinerja ini memiliki target sebesar 99 % dan terdapat capaian sebesar 100 %. Berdasarkan Data Ekspor SKIPM Merauke Tahun 2024 Periode Bulan Januari Sampai dengan Desember adalah sebagai berikut :

A = HC yang diterbitkan oleh SKIPM Merauke = 19

B = Jumlah HC yang ditolak oleh negara tujuan = 0

$$x = \frac{19 - 0}{19} \times 100 \%$$

Tabel. 10
Data Jumlah Sertifikasi Ekspor Tahun 2024 Tabel. 11
Target dan Realisasi IKS 01.04 Tahun 2024

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2024						Renstra 2020-2024	
		2019	2020	2021	2022	2023	Realisasi Periode Sebelumnya	Target	Realisasi	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	%
1	Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke / %	-	-	-	-	-	-	99	100	101,01	99	101,11	99	101,11

2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Berdasarkan data kinerja SKIPM Merauke pada periode tahun 2023, terdapat indikator kinerja terkait ekspor yaitu Efektivitas Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Yang Memenuhi Persyaratan Karantina dengan target sebesar 98 % dan capaian sebesar 100 %.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Berdasarkan data Renstra terdapat t indikator kinerja Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT SKIPM Merauke sebesar 99 % dan capaian sebesar 100 %.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Secara umum indikator kinerja Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT SKIPM Merauke telah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 100 % dari target sebesar 99 %.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada pelaksanaan kinerja indikator ini yaitu dengan melakukan efisiensi jumlah personil yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya. Serta terdapat program penggunaan teknologi atau sistem informasi baru untuk mengakomodir kebutuhan pelaksanaan kegiatan ekspor.

6.

7. Realisasi Anggaran

Indikator kinerja ini didukung oleh bebrapa kegiatan terkait ekspor diantaranya yaitu Registrasi UPI Ke Negara Mitra dan atau Negara Tujuan Ekspor dengan pagu anggaran dan realisasi sebesar Rp. 3.640.000 atau setara dengan 100 %. Selain itu kegiatan Produk Perikanan yang Diawasi dan Diselesaikan Kasus Mutu Ekspor Impor-nya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 9.600.000 telah terealisasi sebesar Rp. 9.599.264, atau setara dengan 99,99 %.

8. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana aksi yang dilaksanakan untuk mendukung indikator kinerja Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT SKIPM Merauke dengan meningkatkan kompetensi SDM, meningkatkan koordinasi lingkup internal BPPMHKP serta melakukan sosialisasi eksternal ke pengguna jasa dan *stakeholder* terkait.

Sasaran 02 : Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Yang Konsisten Sesuai Standar

Sasaran kegiatan yang kedua yang terdapat di dokumen kinerja SKIPM Merauke, adalah Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Yang Konsisten Sesuai Standar Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran kegiatan tersebut terdapat satu indikator kinerja sebagai berikut :

3. IKS. 01.03 Persentase Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke

Pengawasan mutu adalah semua kegiatan yang meliputi bimbingan fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan. Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI merupakan nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan di wilayah Republik Indonesia yang meliputi pengawasan implementasi dari terbitnya Inpres 01 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan melalui monitoring terhadap cemaran marine biotoxin dan/atau cemaran kimia berbahaya yang berdampak pada mutu hasil kelautan dan perikanan.

Monitoring kesegaran ikan, residu dan bahan berbahaya tidak hanya merupakan salah satu upaya dalam mencegah tersebarnya hama dan penyakit ikan, tetapi juga sebagai upaya untuk menjawab tantangan global dimana tuntutan masyarakat terhadap bahan pangan yang aman dan bergizi semakin meningkat. Kegiatan monitoring kesegaran ikan, residu dan bahan berbahaya dilakukan di pelabuhan perikanan, pasar dan supplier/miniplant, ini sebagai upaya pencegahan sebelum bahan pangan sampai kepada konsumen sehingga ketahanan pangan dan keamanan pangan secara global dapat terwujud.

Lokasi dari kegiatan pengawasan ini dilakukan di Kabupaten/Kota yang konsumsi ikannya tinggi dengan lokus adalah pasar modern, pasar tradisional, supplier, TPI/PPI yang produk ikannya dikonsumsi oleh masyarakat lokal/domestik. Melalui pengawasan penilaian sarana prasarana dan pengujian sampel produk perikanan dengan parameter uji organoleptik, mikrobiologi, kimia dan bahan berbahaya (formalin) dan parameter uji lain yang diperlukan dan lokasi wilayah perairan/pelabuhan perikanan di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan monitoring terhadap ikan dan/atau hasil perikanan yang menjadi sumber bahan

baku Industri maupun konsumsi domestik yang bebas dari cemaran marine biotoxin dan cemaran kimia berbahaya.

Pengambilan contoh produk perikanan yang diperdagangkan di pasar tradisional dan modern yang dilakukan oleh Inspektur Mutu bersama dengan pihak pengelola pasar tradisional dan pasar modern. Contoh tersebut selanjutnya akan dilakukan pengujian terhadap suhu, organoleptik, uji kimia dan mikrobiologi di laboratorium yang terakreditasi. Selain itu, dilakukan juga pengamatan kondisi sarana prasarana dari lokasi usaha yang menjadi objek pengawasan dan pengendalian yang bertujuan untuk menilai penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk konsumsi domestik. Berikut formula perhitungan yang dipergunakan untuk menghitung indikator kinerja persentase pengawasan mutu dan hasil perikanan di wilayah RI :

A = Jumlah kab/kota/ yang dilakukan pengawasan mutu hasil KP di wilayah RI

B = Jumlah kab/kota/ yang ditetapkan untuk dilakukan pengawasan mutu hasil KP di wilayah RI

Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17025 dan ISO/IEC 17020 dan dinyatakan dalam bentuk presentase berdasarkan Tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki.

ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium penguji yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri.

Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji (ISO 17025) di laboratorium official control yang dinilai melingkupi:

1. Ruang Lingkup;
2. Acuan Normatif;
3. Persyaratan Umum;
4. Persyaratan Struktural;
5. Persyaratan Sumber Daya;
6. Persyaratan Proses;
7. Persyaratan Sistem Manajemen.

ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Nilai kualitas penerapan ISO/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi (ISO 17020) yang dinilai melingkupi:

1. Persyaratan Umum;
2. Persyaratan Struktural;
3. Persyaratan Sumberdaya;
4. Persyaratan Proses;
5. Persyaratan Sistem Manajemen.

Pada tanggal 2 sampai 3 September 2024 SKIPM Merauke telah melaksanakan re-akreditasi Lembaga Inspeksi SNI ISO 17020:2012 bersama Komisi Akreditasi Nasional (KAN) dan telah menyelesaikan seluruh tahapan yang telah ditentukan. Sehingga dapat diterbitkan Sertifikat Akreditasi dengan nomor LI-153-IDN yang berlaku sampai dengan 18 November 2029. Dengan tipe lembaga inspeksi tipe A, pada bidang inspeksi dan sub bidang inspeksi: perikanan (surveilans HACCP).

Gambar. 9

Kegiatan Re-akreditasi Lembaga Inspeksi SNI ISO 17020:2012 di SKIPM Merauke Tahun 2024



Berikut formula perhitungan indikator kinerja Nilai Pemenuhan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Penguji dan Lembaga Inspeksi Lingkup UPT SKIPM Merauke :

$$\% X = \frac{A+B}{2} \times 100\%$$

% X = Persentase Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi

A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020

B = Persentase Penerapan ISO 17025

1. Capaian Indikator Kinerja

Tabel. 12

Target dan Realisasi IKS 03.01 Tahun 2024

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2024						Renstra 2020-2024	
		2019	2020	2021	2022	2023	Realisasi Periode Sebelumnya	Target	Realisasi	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	%
1	Persentase Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke / Persen	-	-	-	-	-	-	70	15	83,10	70	118,71	70	118,71

Pada tahun 2024 Pusat Manajemen Mutu BPPMHKP telah melakukan pengukuran lingkup UPT terhadap nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium sebanyak unit sampling 13 laboratorium dengan capaian nilai sebesar 81,35. Selain itu dilakukan juga pengukuran nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi sebanyak 14 lembaga inspeksi dengan capaian nilai sebesar 84,85. Berdasarkan nilai-nilai tersebut, perhitungan nilai capaian indikator kinerja Nilai Pemenuhan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Penguji dan Lembaga Inspeksi Lingkup UPT yang dapat dipergunakan oleh SKIPM Merauke pada tahun 2024 menggunakan capaian rata-rata yaitu sebesar 83,10 atau setara dengan 118,71 % dari target sebesar 70 %.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Berdasarkan data capaian kinerja tahun 2024 terdapat indikator kinerja terkait laboratorium, namun lebih spesifik pada Penambahan Ruang Lingkup Parameter Uji Yang Terakreditasi Lingkup UPT KIPM Merauke. Sehingga indikator kinerja Nilai Pemenuhan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Penguji dan Lembaga Inspeksi Lingkup UPT SKIPM Merauke tidak dapat diperbandingkan dengan periode sebelumnya.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Berdasarkan dokumen Renstra capaian dari indikator kinerja Nilai Pemenuhan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Penguji dan Lembaga Inspeksi Lingkup UPT SKIPM Merauke telah diupayakan secara maksimal agar dapat tercapai atau melebihi target pada periode tahunan.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Secara umum capaian dari indikator kinerja Nilai Pemenuhan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Penguji dan Lembaga Inspeksi Lingkup UPT SKIPM Merauke telah tercapai melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2024.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada upaya pencapaian indikator kinerja Nilai Pemenuhan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Penguji dan Lembaga Inspeksi Lingkup UPT SKIPM Merauke dalam bentuk efisiensi penggunaan berupa efisiensi jumlah personil yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya. Serta terdapat penggunaan teknologi atau media informasi untuk mengakomodir kebutuhan pelaksanaan kegiatan.

6. Realisasi Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran tahun 2024, indikator kinerja Nilai Pemenuhan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Penguji dan Lembaga Inspeksi Lingkup UPT SKIPM Merauke didukung dengan kegiatan Penguatan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Penguji yang memiliki anggaran sebesar Rp. 53.619.000,- dengan nilai serapan sebesar Rp. 53.616.762,- atau setara dengan mendekati 100 % dari pagu anggaran.

7. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana aksi yang dilakukan dalam rangka mendukung indikator kinerja Nilai Pemenuhan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Penguji dan Lembaga Inspeksi Lingkup UPT SKIPM Merauke : pelaksanaan program dan rencana kegiatan; meningkatkan koordinasi internal baik di UPT maupun pusat, serta mengikuti seluruh tahapan dalam kegiatan dari Komite Akreditasi Nasional.

4. IKS. 01.04 Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC yang terbit) dan volume yang diekspor ke pasar internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor).

Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Rasio ini penting untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional.

Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia dan bukti pengiriman hasil perikanan yang telah memenuhi persyaratan adalah diterimanya Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan. Berikut formula yang digunakan untuk melakukan perhitungan indikator kinerja Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke tahun 2024 :

$$x = \frac{A-B}{A} \times 100 \%$$

x = Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)

A = HC yang diterbitkan oleh BPPMHKP

B = Jumlah HC yang ditolak oleh negara tujuan

1. Capaian Indikator Kinerja

Pada tahun 2024 indikator kinerja Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke telah ditentukan target dan periodenya. Pada periode tahun 2024, indikator kinerja ini memiliki target sebesar 99 % dan terdapat capaian sebesar 100 %. Berdasarkan Data Ekspor SKIPM Merauke Tahun 2024 Periode Bulan Januari Sampai dengan Desember adalah sebagai berikut :

A = HC yang diterbitkan oleh SKIPM Merauke = 0

B = Jumlah HC yang ditolak oleh negara tujuan = 0

2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Berdasarkan data kinerja Stasiun KIPM Merauke pada periode tahun 2023, terdapat indikator kinerja terkait ekspor yaitu Efektivitas Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Yang Memenuhi Persyaratan Karantina dengan target sebesar 98 % dan capaian sebesar 100 %.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Berdasarkan data Renstra terdapat t indikator kinerja Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke sebesar 99 % dan capaian sebesar 100 %.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Secara umum indikator kinerja Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke telah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 100 % dari target sebesar 99 %.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada pelaksanaan kinerja indikator ini yaitu dengan melakukan efisiensi jumlah personil yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya. Serta terdapat program penggunaan teknologi atau sistem informasi baru untuk mengakomodir kebutuhan pelaksanaan kegiatan ekspor.

6. Realisasi Anggaran

Indikator kinerja ini didukung oleh beberapa kegiatan terkait ekspor diantaranya yaitu Registrasi UPI Ke Negara Mitra dan atau Negara Tujuan Ekspor dengan pagu anggaran dan realisasi sebesar Rp. 3.640.000 atau setara dengan 100 %. Selain itu kegiatan Produk Perikanan yang Diawasi dan Diselesaikan Kasus Mutu Ekspor Impor-nya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 9.600.000 telah terealisasi sebesar Rp. 9 599.264, atau setara dengan 99,99 %.

7. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana aksi yang dilaksanakan untuk mendukung indikator kinerja Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke dengan meningkatkan kompetensi SDM, meningkatkan koordinasi lingkup internal BPPMHKP serta melakukan sosialisasi eksternal ke pengguna jasa dan *stakeholder* terkait.

Sasaran 02 : Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Yang Konsisten Sesuai Standar

Sasaran kegiatan yang kedua yang terdapat di dokumen kinerja Stasiun KIPM Merauke, adalah Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Yang Konsisten Sesuai Standar Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran kegiatan tersebut terdapat satu indikator kinerja sebagai berikut :

IKS. 02.01 Nilai Pemenuhan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Penguji dan Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke

Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17025 dan ISO/IEC 17020 dan dinyatakan dalam bentuk presentase berdasarkan Tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki.

ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium penguji yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri.

Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji (ISO 17025) di laboratorium official control yang dinilai melingkupi:

Ruang Lingkup;

Acuan Normatif;

Persyaratan Umum;

Persyaratan Struktural;

Persyaratan Sumber Daya;

Persyaratan Proses;

Persyaratan Sistem Manajemen.

ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Nilai kualitas penerapan ISO/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi (ISO 17020) yang dinilai melingkupi:

Persyaratan Umum;

Persyaratan Struktural;

Persyaratan Sumberdaya;

Persyaratan Proses;

Persyaratan Sistem Manajemen.

Pada tanggal 2 sampai 3 Juli 2024 SKIPM Merauke telah melaksanakan re-akreditasi Lembaga Inspeksi SNI ISO 17020:2012 bersama Komisi Akreditasi Nasional (KAN) dan telah menyelesaikan seluruh tahapan yang telah ditentukan. Sehingga dapat diterbitkan Sertifikat Akreditasi dengan nomor LI-141-IDN yang berlaku sampai dengan 22 Juli 2024. Dengan tipe lembaga inspeksi tipe A, pada bidang inspeksi dan sub bidang inspeksi: perikanan (surveilans HACCP).



1. Capaian Indikator Kinerja

Tabel. 12
Target dan Realisasi IKS 02.01 Tahun 2024

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2024						Renstra 2020-2024	
		2019	2020	2021	2022	2023	Realisasi Periode Sebelumnya	Target	Realisasi	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	%
1	Nilai Pemenuhan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Pengujian dan Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke (%)	-	-	-	-	-	-	70	15	83,10	70	118,71	70	118,71

Pada tahun 2024 Pusat Manajemen Mutu BPPMHKP telah melakukan pengukuran lingkup UPT terhadap nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium sebanyak unit sampling 13 laboratorium dengan capaian nilai sebesar 81,35. Selain itu dilakukan juga pengukuran nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi sebanyak 14 lembaga inspeksi dengan capaian nilai sebesar 84,85. Berdasarkan nilai-nilai tersebut, perhitungan nilai capaian indikator kinerja Nilai Pemenuhan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Pengujian dan Lembaga Inspeksi Lingkup UPT yang dapat dipergunakan oleh Stasiun KIPM Merauke pada tahun 2024 menggunakan capaian rata-rata yaitu sebesar 83,10 atau setara dengan 118,71 % dari target sebesar 70 %

2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Berdasarkan data capaian kinerja tahun 2023 terdapat indikator kinerja terkait laboratorium, namun lebih spesifik pada Penambahan Ruang Lingkup Parameter Uji Yang Terakreditasi Lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke. Sehingga indikator kinerja Nilai Pemenuhan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Pengujian dan Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke tidak dapat diperbandingkan dengan periode sebelumnya.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Berdasarkan dokumen Renstra capaian dari indikator kinerja Nilai Pemenuhan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Pengujian dan Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke telah diupayakan secara maksimal agar dapat tercapai atau melebihi target pada periode tahunan.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Secara umum capaian dari indikator kinerja Nilai Pemenuhan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Pengujian dan Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke telah tercapai melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2024.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada upaya pencapaian indikator kinerja Nilai Pemenuhan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Pengujian dan Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke dalam bentuk efisiensi penggunaan berupa efisiensi jumlah personil yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya. Serta terdapat penggunaan teknologi atau media informasi untuk mengakomodir kebutuhan pelaksanaan kegiatan.

6. Realisasi Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran tahun 2024, indikator kinerja Nilai Pemenuhan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Pengujian dan Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke didukung dengan kegiatan Penguatan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Pengujian yang memiliki anggaran sebesar Rp. 53.619.000,- dengan nilai serapan sebesar Rp. 53.616.762,- atau setara dengan mendekati 100 % dari pagu anggaran.

7. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana aksi yang dilakukan dalam rangka mendukung indikator kinerja Nilai Pemenuhan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Pengujian dan Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke : pelaksanaan program dan rencana kegiatan; meningkatkan koordinasi internal baik di UPT maupun pusat, serta mengikuti seluruh tahapan dalam kegiatan dari Komite Akreditasi Nasional.

6. IKS. 03.01 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan UPT Stasiun KIPM Merauke

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. SKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas publik selanjutnya.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPMHKP menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat : <https://ptsp.kkp.go.id/skm/login>. Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing UPT BPPMHKP.

Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisioner dari seluruh UPT BPPMHKP. Berikut formula yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan UPT SKIPM Merauke :

$$\text{Bobot Nilai Rata – Rata Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,1111$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur} \times \text{Nilai penimbang}}{\text{Total unsur yang terisi}}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM unit pelayanan} \times 25$$

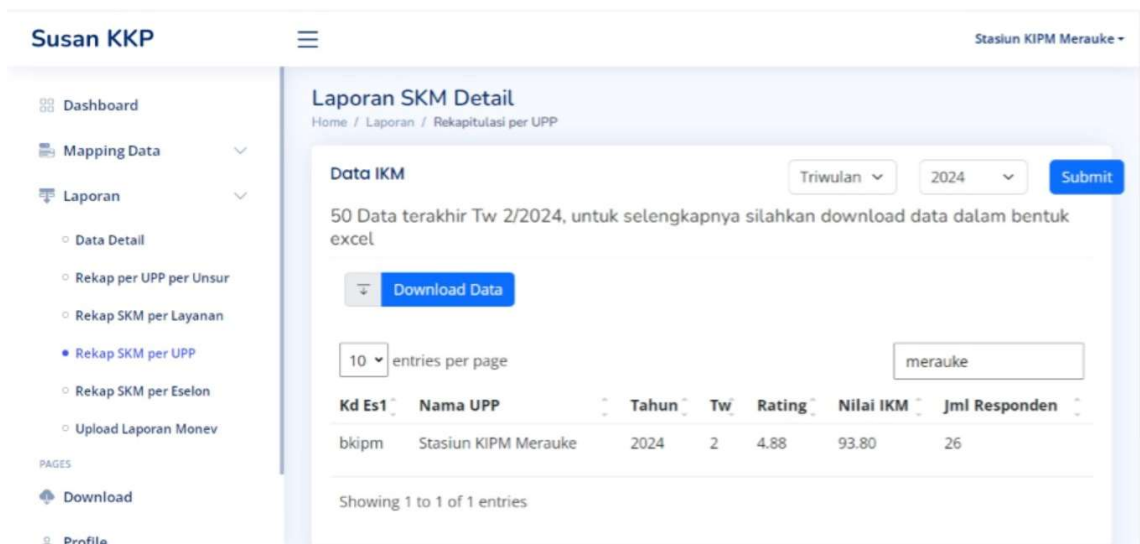
1. Capaian Indikator Kinerja

Pada periode akhir tahun 2024 ini, SKIPM Merauke melakukan kembali pengukuran survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan, yaitu pelaksanaan kegiatan pada bulan tahun 2024. Pengukuran dilakukan dengan merekap/mendata responden SKIPM Merauke sebanyak 10 (sepuluh) responden yang mengisi kuesioner secara online dan terintegrasi pada link www.ptsp.kkp.go.id.

Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas unsur pelayanan SKIPM Merauke, diperoleh hasil skor Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebesar 91,44. Capaian nilai tersebut jika dilakukan perhitungan intersepsi diperoleh nilai sebesar 3,66. Nilai capaian yang dianggap menggambarkan bahwa kinerja unit pelayanan ini dalam memberikan layanan yang dibutuhkan masyarakat masuk dalam kategori kinerja pelayanan “Sangat Baik”. Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan, secara umum kualitas pelayanan pada SKIPM Merauke dipersepsikan baik oleh masyarakat pengguna jasa. Hasil pelaksanaan SKM telah dipublikasikan kepada publik melalui social media. Nilai SKM yang menjadi capaian BPPMHKP pada triwulan IV tahun 2024 adalah sebesar 94,87, dengan rata rata per unsur 3,79. SKIPM Merauke memiliki perolehan yang lebih dari target yang telah ditetapkan yaitu nilai rata-rata SKM di 47 satuan kerja lingkup BPPMHKP yaitu sebesar 88,30.

Gambar. 10

Capture Portal Penilaian Hasil SKM SKIPM Merauke Pada Aplikasi Susan KKP Tahun 2024



Kd Est	Nama UPP	Tahun	Tw	Rating	Nilai IKM	Jml Responden
bkipm	Stasiun KIPM Merauke	2024	2	4.88	93.80	26

Tabel. 13
Target dan Realisasi IKS 03.01 Tahun 2024

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2024						Renstra 2020-2024	
		2019	2020	2021	2022	2023	Realisasi Periode Sebelumnya	Target	Realisasi	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	%
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan UPT Stasiun KIPM Merauke / Indeks	-	-	-	-	-	-	3,36	3,66	93.80	3,36	93.80	3,36	108,93

2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Berdasarkan data tahun 2023 terkait capaian indikator kinerja Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik Di UPT SKIPM Merauke pada terdapat sedikit penurunan capaian dari nilai 91,67 menjadi sebesar 91,44. Jika dilakukan perbandingan dengan capaian indeks tahun 2024 harus dilakukan perhitungan intersepsi terlebih dahulu.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Berdasarkan data pada dokumen Renstra capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan UPT SKIPM Merauke telah melebihi target yang ditetapkan.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Secara umum capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan UPT SKIPM Merauke telah melebihi target yang ditetapkan. Analisa lebih lanjut telah diupayakan untuk menghindari terjadinya kesalahan input data pada pengisian oleh responden. Berdasarkan hasil evaluasi terdapat peningkatan pada nilai keseluruhan unsur pelayanan yang menjadi unsur survei kepuasan masyarakat dibandingkan capaian periode sebelumnya. *Human error* dimungkinkan dapat terjadi sebagai keputusan atau perilaku responden yang tidak tepat yang mengurangi atau berpotensi mengurangi efektivitas, keselamatan atau performa sistem yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi performa instansi. Hal ini menjadi informasi penting agar SKIPM Merauke untuk semakin meningkatkan kualitas pelayanannya, serta meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait salah satunya dengan Badan Karantina Indonesia di Merauke, karena sampai dengan saat ini secara sistem dan proses masih terkait dengan kegiatan pelayanan karantina ikan. Koordinasi harus terus ditingkatkan agar pengguna jasa layanan mendapatkan pelayanan lebih baik di masa yang akan datang.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mendukung capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan UPT SKIPM Merauke, karena dalam implementasinya indikator ini melibatkan dukungan dari seluruh kegiatan bidang teknis pada pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan.

6. Realisasi Anggaran

Dari sisi anggaran indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan UPT SKIPM Merauke tahun 2024 didukung melalui kegiatan pelayanan kepada pengguna jasa. Sampai dengan tahun 2024 pagu anggaran terkait indikator kinerja ini tidak dialokasikan secara khusus.

7. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana aksi yang dilakukan untuk mendukung indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan UPT SKIPM Merauke tahun 2024 adalah dengan melakukan pengembangan pelayanan publik untuk memudahkan pengguna layanan serta melakukan monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut yang telah ditempuh sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan. Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan yaitu internalisasi budaya pelayanan prima, *refreshment* peraturan dan sosialisasi kepada pengguna jasa.

8. IKS. 03.02 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT SKIPM Merauke

Profesionalisme pegawai dalam sebuah organisasi sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan yang tercermin melalui perilaku sehari-hari. Kemampuan menunjukkan potensi dalam melaksanakan tugas yang mungkin dan tidak mungkin dilakukan. Sedangkan profesional dalam pendekatan sistem merit mengandung persyaratan kompetensi (pengetahuan, keahlian, pengalaman), kualifikasi (pendidikan, pelatihan), kinerja (target, pencapaian), kompensasi (kebutuhan, external equity), dan disiplin. Berdasarkan hal tersebut, maka indikator yang digunakan untuk mengukur indeks profesionalitas ASN adalah kompetensi, kinerja, kompensasi, dan disiplin, dengan rumus matematis melalui sistem yang telah ditentukan.

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

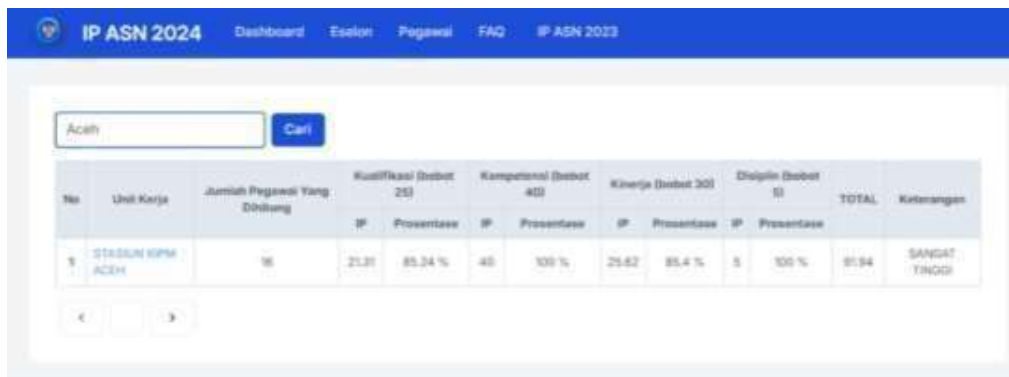
Formula perhitungan indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT SKIPM Merauke diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi : kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin.

1. Capaian Indikator Kinerja

Berdasarkan data pada ropeg.kkp.go.id tahun 2024, target dari indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT SKIPM Merauke mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yaitu menjadi sebesar 86, serta dengan target periode semester I tahun 2024 sebesar 81. Dalam periode tahun 2024 dilakukan perhitungan capaian realisasi kembali melalui <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn>, melalui halaman tersebut diperoleh nilai IP ASN SKIPM Merauke sebesar 91,94 atau setara dengan 106,91 %. Capaian nilai tersebut dicapai atas kerjasama seluruh pegawai SKIPM Merauke yang mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat terkait kompetensi yang dapat meningkatkan profesionalitas kinerja. Berdasarkan data, SKIPM Merauke mendapatkan indeks dengan kategori sangat tinggi, jika dibandingkan dengan capaian unit pelaksana teknis lainnya di seluruh Indonesia, yaitu menempati urutan ke 3 tertinggi . Capaian indeks tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian level unit eselon I dan kementerian.

Gambar. 11

Capture Nilai IP ASN SKIPM Merauke Tahun 2024



No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Didukung	Kualifikasi (Bobot 25)		Kompetensi (Bobot 40)		Kinerja (Bobot 30)		Disiplin (Bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Persentase	IP	Persentase	IP	Persentase	IP	Persentase		
1	STASIUN KIPM ACEH	16	21,31	85,24 %	40	100 %	29,62	85,4 %	5	100 %	91,94	SANGAT TINGGI

Tabel 14.

Target dan Realisasi IKS 03.02 Tahun 2024

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2024						Renstra 2020-2024	
		2019	2020	2021	2022	2023	Realisasi Periode Sebelumnya	Target	Realisasi	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	%
1	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT SKIPM Merauke / Indeks	-	81,57	82,36	83,45	89,89	90,34	86	91,94	106,91	86	106,91	86	106,91

2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Berdasarkan data capaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT SKIPM Merauke tahun 2023 terdapat peningkatan capaian dari nilai 89,89 menjadi 91,94 pada tahun 2024.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Berdasarkan dokumen Renstra, indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT SKIPM Merauke capaian yang telah melebihi target yang harus dicapai sebesar 86.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Secara umum indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN menjadi salah satu indikator kinerja utama yang terus mendapat perhatian dari seluruh pegawai. Selain itu Kepala SKIPM Merauke berkomitmen untuk memberikan kesempatan kepada seluruh pegawai untuk dapat meningkatkan kompetensi untuk mendukung kinerjanya.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada upaya pencapaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT SKIPM Merauke. Seluruh pegawai memanfaatkan adanya teknologi informasi untuk mengikuti seminar, pelatihan dan bimbingan teknis terkait secara *daring*. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh BPPMHKP, Unit eselon lain, e-milea KKP maupun penyelenggara eksternal lainnya.

6. Realisasi Anggaran

Dari sisi anggaran indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN tidak secara khusus dialokasikan. Terdapat pagu anggaran dukungan manajemen internal dari kegiatan Layanan Perencanaan, Pengembangan dan Pembinaan SDMA sebesar Rp. 7.753.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.7.753.000,- atau besarnya setara dengan 100 %.

7. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana aksi yang dilaksanakan dalam rangka mendukung indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup SKIPM Merauke adalah dengan melakukan konsolidasi internal lingkup SKIPM Merauke serta melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan serta melakukan monitoring evaluasi secara periodik terhadap data IP ASN seluruh pegawai. Selanjutnya secara mandiri setiap pegawai PNS melakukan input data pada portal BKN dan selanjutnya dilakukan verifikasi oleh operator yang telah ditunjuk. Hal ini akan terus dilakukan pada periode selanjutnya.

7. IKS. 03.04 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT SKIPM Merauke

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha-usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah merubah orientasinya dari yang biasanya berorientasi kepada anggaran (input) atau kegiatan (output) semata menjadi berorientasi kepada hasil atau outcome.

Nilai Penilaian Mandiri SAKIP SKIPM Merauke dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni : perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi kinerja (25%). Penilaian evaluasi AKIP dilakukan menggunakan LHE yang terdapat pada sistem aplikasi pengelolaan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu aplikasi Kinerja KKP. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Level II merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di lingkungan BPPMHKP. Nilai PM SAKIP Level II adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil Inspektorat Mitra dari Unit Eselon I. Apabila penilaian tidak dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Mitra, maka nilai SAKIP Level II diperoleh melalui Penilaian Mandiri SAKIP oleh Sekretariat BPPMHKP.

- **Capaian Indikator Kinerja**

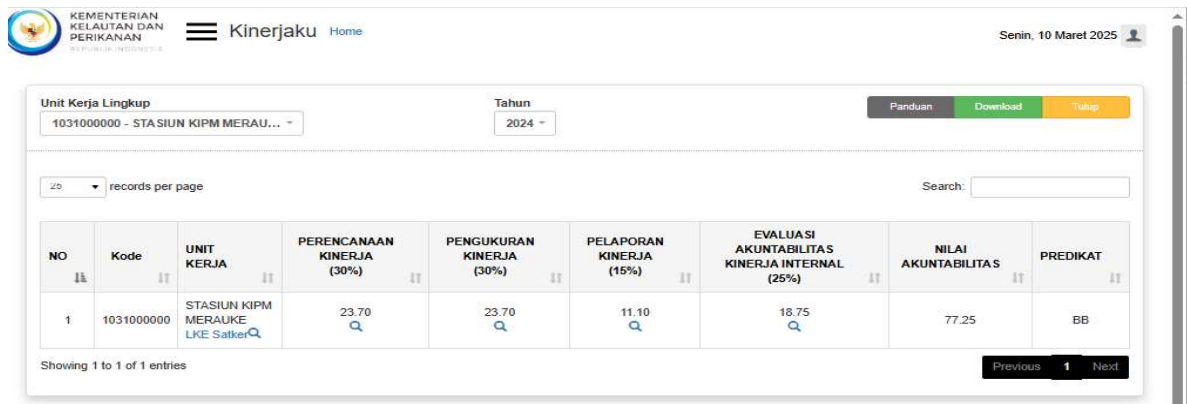
Tabel. 17

Target dan Realisasi IKS 03.04 Tahun 2024

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2024						Renstra 2020-2024	
		2019	2020	2021	2022	2023	Realisasi Periode Sebelumnya	Target	Realisasi	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	%
1	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT SKIPM Merauke / Nilai	-	-	87,40	-	-	-	82	85,50	104,27	82	104,27	82	104,27

Pada tahun 2024 ini telah dilakukan penilaian secara mandiri oleh Sekeretaryat BPPMHKP bersama dengan Tim Penilai Internal lingkup KKP melalui LKE yang terdapat pada <https://kinerjaku.kkp.go.id>. Berdasarkan data capaian SAKIP lingkup BPPMHKP, SKIPM Merauke menempati urutan tinggi jika dibandingkan dengan unit pelaksana teknis lainnya di seluruh Indonesia. Berikut tampilan gambar / *capture* dari penilaian mandiri tersebut.

Capture Penilaian Mandiri SAKIP SKIPM Merauke Pada Kinerja KKP Tahun 2024



The screenshot shows the Kinerjaku application interface. At the top, there is a header with the logo of the Ministry of Marine and Fisheries, the text 'Kinerjaku Home', and the date 'Senin, 10 Maret 2025'. Below the header, there is a search bar and a table of performance evaluation results for the year 2024. The table has 9 columns: NO, Kode, UNIT KERJA, PERENCANAAN KINERJA (30%), PENGUKURAN KINERJA (30%), PELAPORAN KINERJA (15%), EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL (25%), NILAI AKUNTABILITAS, and PREDIKAT. The table contains one entry for the unit 'STASIUN KIPM MERAUKE' with a predicted grade of 'BB'.

NO	Kode	UNIT KERJA	PERENCANAAN KINERJA (30%)	PENGUKURAN KINERJA (30%)	PELAPORAN KINERJA (15%)	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL (25%)	NILAI AKUNTABILITAS	PREDIKAT
1	1031000000	STASIUN KIPM MERAUKE	23.70	23.70	11.10	18.75	77.25	BB

- **Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya**

Berdasarkan data kinerja tahun 2023 tidak terdapat target indikator kinerja penilaian mandiri SAKIP sehingga secara pencapaian indikator kinerja ini tidak dapat secara langsung diperbandingkan. Namun terdapat indikator kinerja Nilai Rekonsiliasi Kinerja yang secara sistem melakukan evaluasi atau penilaian terhadap dokumen-dokumen kinerja seluruh unit kerja lingkup BKIPM.

- **Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra**

Target Penilaian Mandiri SAKIP merupakan indikator kinerja yang tidak setiap tahun masuk dalam dokumen kinerja. Penilaian mandiri SAKIP telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup BKIPM pada tahun 2021. Terdapat unit kerja yang menjadi *sampel* uji petik penilaian SAKIP secara langsung yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal lingkup KKP.

- **Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi**

Analisa keberhasilan pencapaian indikator kinerja Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT SKIPM Merauke adalah didukung oleh keterlibatan pimpinan dalam setiap unsur AKIP, pemenuhan dokumen, peningkatan kualitas dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja internal. Diperlukan peningkatan sumber daya pengelola kinerja baik melalui diklat atau bimbingan teknis baik secara langsung maupun online secara periodik.

- **Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya, dimana dalam pencapaian indikator kinerja Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT SKIPM Merauke dilaksanakan oleh tim yang telah ditunjuk. Selain itu terdapat efisiensi lainnya, karena indikator kinerja ini secara khusus tidak didukung dengan anggaran yang khusus terkait SAKIP, namun dapat dikategorikan masuk komponen dukungan manajemen internal pada kegiatan perencanaan dan penganggaran.

- **Realisasi Anggaran**

Pada sisi anggaran terkait perencanaan dan penganggaran terpadat pagu anggaran sebesar Rp. 29.014.000,- dengan realisasi sampai dengan tahun 2024 tercapai mendekati 100 %.

- **Rencana Kegiatan Periode Berikutnya**

Rencana aksi yang dilaksanakan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja ini adalah dengan melakukan konsolidasi internal serta melakukan penyusunan dan pengumpulan dokumen akuntabilitas kinerja sesuai dengan ketentuan sehingga dapat digunakan sebagai data pendukung penilaian SAKIP SKIPM Merauke.

8. IKS. 03.05 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT SKIPM Merauke

Nilai Kinerja Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator

Target Akhir Tahun Anggaran 2024 Level 0 (K/L) 82,00 Kategori Nilai Kinerja Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain:

- Sangat Baik, apabila NKA > 90;
- Baik, apabila NKA >80 – 90;
- Cukup, apabila NKA >60 – 80;
- Kurang, apabila NKA >50 – 60;
- Sangat Kurang, apabila NKA ≤ 50

Secara otomatis nilai capaian indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) dapat diperoleh melalui aplikasi monev Kemenkeu di halaman <https://monev.kemenkeu.go.id/> yang terkoneksi juga dengan aplikasi SAKTI. Sedangkan secara manual formula perhitungan indikator kinerja ini dapat dilihat dalam tampilan dibawah ini :

Cara Perhitungan:

NKA Unit Eselon I

NKA Unit Eselon I, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian Capaian Indikator Kinerja Program, Nilai Efektivitas Satker dan Nilai Efisiensi Satker dengan bobot masing-masing indikator. Adapun bobot setiap indikator Kinerja Anggaran Tingkat Unit Eselon I sebagai berikut:

Variabel	Uraian	Bobot
Efektivitas (75)	1. Capaian Indikator Kinerja Program	30
	2. Nilai Efektivitas Satker	45
Efisiensi (25)	1. Nilai Efisiensi Satker	25

a. Efektivitas

1) Capaian Indikator Kinerja Program

$$CIKP = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{RIKP_i}{TIKP_i} \times \frac{1}{n} \right) \times 100\% \right)$$

Keterangan :

CIKSS : Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga

RIKSS_i : Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis i

TIKSS_i : Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis i

n : Jumlah Indikator Kinerja Sasaran Strategis

2) Nilai Efektivitas Satker

$$NEf\ Satker = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{RVRO_i}{TVRO_i} \times \frac{1}{n} \right) \times 100\% \right)$$

Keterangan :

NEf Satker : Nilai Efektivitas Satker

RVRO_i : Realisasi Volume RO i

TVRO_i : Target Volume RO i

n : Jumlah RO seluruh Satker

b. Efisiensi

$$NE\ Satker = (40\% \times \text{Penggunaan SBK}) + (60\% \times \text{Efisiensi SBK})$$

Formula Perhitungan NKA Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

$$NKA\ UEI = (CIKP \times W_{CIKP}) + (NEf_{satker} \times WNEf_{satker}) + (NE_{satker} \times WNE_{satker})$$

Keterangan:

NKA UEI : Nilai Kinerja Anggaran Unit Eselon I

CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program

NEf_{satker} : Nilai Efektivitas Satker

NE_{satker} : Nilai Efisiensi Satker

W_{CIKP} : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program

WNEf_{satker} : Bobot Nilai Efektivitas Satker

1. Capaian Indikator Kinerja

Pada tahun 2024 indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dilakukan penilaian. Nilai kinerja ini diperoleh dari aplikasi monev Kemenkeu yang telah terkoneksi dengan aplikasi SAKTI. Capaian yang diperoleh adalah sebesar 92,50 dari target sebesar 71 atau setara dengan 120 %. Capaian ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian level I sebesar 82, 83 dan level kementerian sebesar 87,17. Berikut tampilan layar nilai kinerja perencanaan anggaran SKIPM Merauke Tahun 2024.

Gambar. 13

**Capture Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran SKIPM Merauke Pada Aplikasi Monev
Kemenkeu Tahun 2024**



Re. No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Capaian BK	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
1			92,50	120,00	120,00	50,00

Tabel. 18

Target dan Realisasi IKS 03.05 Tahun 2024

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2024						Renstra 2020-2024	
		2019	2020	2021	2022	2023	Realisasi Periode Sebelumnya	Target	Realisasi	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	%
1	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT SKIPM Merauke / Nilai	-	-	-	-	-	-	71	92,50	120	71	120	71	120

2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Berdasarkan data capaian kinerja tahun 2023 terdapat indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran yang dilakukan secara otomatis perhitungan melalui <https://monev.kemenkeu.go.id/>. Namun nilai ini tidak dapat diperbandingkan dengan indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT SKIPM Merauke pada tahun 2024. Hal ini karena pendekatan nilai dari indikator ini adalah pada sisi perencanaan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Target indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT SKIPM Merauke pada tahun 2024 adalah sebesar 71 dan dapat tercapai melebihi target sebesar 92,50.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Analisa keberhasilan yang dapat mendukung indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT SKIPM Merauke adalah disebabkan oleh adanya komitmen pimpinan dan seluruh pegawai terhadap pelaksanaan kegiatan secara tepat waktu dan dilakukan monitoring secara berkala terhadap penyerapan anggaran, konsistensi dan capaian output.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya terkait anggaran, karena secara khusus tidak terdapat alokasi anggaran untuk mendukung indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT SKIPM Merauke. Secara gabungan, terdapat anggaran pada bidang dukungan manajemen internal pada komponen layanan pemantauan dan evaluasi. Selain itu terdapat efisiensi penggunaan sumber daya yaitu dengan dilakukan oleh para pegawai yang berkompeten di bidangnya dalam pencapaian target kinerja serta terdapat pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung capaian kinerja target tersebut.

6. Realisasi Anggaran

Secara khusus tidak terdapat alokasi anggaran untuk mendukung indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT SKIPM Merauke. Secara gabungan, terdapat anggaran pada bidang dukungan manajemen internal pada komponen layanan pemantauan dan evaluasi.

7. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana aksi yang dilakukan SKIPM Merauke untuk meningkatkan nilai NKPA adalah dengan terus berupaya memenuhi ketentuan dalam pelaporan di aplikasi SAKTI serta melakukan strategi untuk menjaga konsistensi rencana penarikan (awal) dengan realisasi anggaran serta rencana penarikan anggaran (revisi). Selain itu meningkatkan konsistensi penginputan capaian realisasi output (CRO) secara periodik atau perbulan, yang mana mewajibkan partisipasi seluruh satuan kerja pelaksana anggaran untuk melakukan entri data pada aplikasi SAKTI yang terintegrasi antara lain memuat program, realisasi anggaran dan volume output kegiatan, serta mencakup variabel penyerapan, konsistensi, CRO, dan efisiensi. Selain itu dilakukan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan indikator kinerja melalui <https://monev.kemenkeu.go.id>.

9. IKS. 03.06 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT SKIPM Merauke

IKPA adalah indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Nilai ini diperoleh dari data input dan output setiap Satuan Kerja lingkup didalam aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan suatu ukuran kuantitatif yang mencerminkan aspek teknis dan administratif dan tata kelola pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh satker K/L.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ini merupakan sebagai alat ukur untuk menentukan tingkat kinerja satker khususnya dalam pelaksanaan anggaran. Aspek pengukuran IKPA meliputi aspek : kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran; kualitas implementasi pelaksanaan anggaran; dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran yang dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, yaitu pengelolaan uang persediaan, data kontrak, kesalahan SPM, retur SP2D, halaman III DIPA, revisi DIPA, penyelesaian tagihan, rekon LPJ, renkas, realisasi, pagu minus dan dispensasi SPM.

Secara teknis aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan telah terintegrasi dengan aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan yang mengintegrasikan seluruh aplikasi satker dengan fungsi utama dari mulai perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Selain itu, SAKTI menerapkan konsep single database. Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga. Seluruh Transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik.

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain

- a. Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
- b. Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$;
- c. Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau
- d. Kurang, apabila nilai IKPA < 70

Hal-hal penting dalam perhitungan indikator kinerja Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai berikut :

1. Revisi DIPA – Bobot Penilaian 10 %
 - ✓ Indikator revisi DIPA dihitung berdasarkan frekwensi revisi DIPA dalam hal kewenangan pagu tetap yang dilakukan satker dalam satu triwulan dimana frekwensi revisi 1 kali dalam satu triwulan (tidak kumulatif)
 - ✓ Revisi kewenangan IKPA, revisi refocusing yang menjadi kebijakan pemerintah dikecualikan dalam perhitungan
 - ✓ Semakin rendah frekwensi revisi DIPA, maka capaian indikator revisi DIPA semakin baik
2. Deviasi RDP (Halaman III DIPA) – Bobot Penilaian 10 %
 - ✓ Indikator Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap rencana penarikan dana (RDP) per jenis belanja setiap bulan
 - ✓ Nilai RDP dikunci setiap awal triwulan dengan batas pemutakhiran RPD sampai dengan 10 hari kerja pertama setiap triwulan, khusus triwulan 1 batas pemutakhiran adalah 10 hari kerja bulan Februari
 - ✓ Semakin rendah deviasi antara realisasi dengan RPD, maka nilai capaian indikator deviasi halaman III DIPA semakin baik
3. Penyerapan Anggaran – Bobot Penilaian 20 %
 - ✓ Indikator penyerapan anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan
 - ✓ Nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran pada setiap triwulan
 - ✓ Semakin tinggi penyerapan anggaran dan melampaui target, semakin baik
4. Dispensi SPM – Bobot Penilaian 5 %
 - ✓ Dispensi SPM dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan pengajuan SPM yang disampaikan ke KPPN dan telag diterbitkan SP2D nya pada triwulan IV
 - ✓ Nilai IKPA diberikan secara bertingkat sesuai dengan kategori rasio dispensasi SPM sebagaimana berikut :

Kategori Nilai	Nilai	Dispensasi SPM yang terbit (Permil)*
Kategori 1	100	0,00 (tidak ada dispensasi SPM)
Kategori 2	95	0,01 – 0,099
Kategori 3	92	0,1 – 0,99
Kategori 4	85	1 – 4,99
Kategori 5	82	>= 5,00

1. Capaian Indikator Kinerja

Indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mempunyai target dengan pengukuran secara semester. Pada tahun 2024, indikator kinerja ini memiliki target tahunan dengan nilai sebesar 93,76, dan target semester I sebesar 83. Capaian indikator tersebut sesuai dengan data dari aplikasi OM-SPAN modul Monev PA yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Berdasarkan data capaian seluruh satuan kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan semester II tahun 2024, SKIPM Merauke menempati urutan ke 26 (dua puluh enam) dari sejumlah 382 satuan kerja. Berikut ditampilkan tangkap layar, serta tabel target dan realisasi capaian indikator kinerja ini.

Gambar. 14

Capture Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) SKIPM Merauke Pada Aplikasi OM SPAN Tahun 2024

Indikator Pelaksanaan Anggaran

EXCEL

PDF

FILTER

FILTER:

SAMPAI DENGAN | DESEMBER

CARI DI HALAMAN... Q

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN	KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)	
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP					CAPAIAN OUTPUT
1	068	032	649704	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAUKE	Nilai	100.00	27.27	25.00	0.00	0.00	100.00	0.00	29.09	80%	0.00	36.36
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.09	5.00	0.00	0.00	10.00	0.00				
					Nilai Aspek	63.64			62.50			0.00				

Tabel. 19

Target dan Realisasi IKS 03.06 Tahun 2024

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2024						Renstra 2020-2024	
		2019	2020	2021	2022	2023	Realisasi Periode Sebelumnya	Target	Realisasi	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	%
1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT SKIPM Merauke / Nilai	-	98,28	97,02	96,17	97,47	97,47	93,76	98,41	104,96	93,76	104,96	93,76	104,96

2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Berdasarkan data indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada periode tahun 2023 terdapat nilai capaian 97,47. Pada tahun 2024 terdapat peningkatan nilai capaian menjadi sebesar 98,41.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Berdasarkan data Renstra indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dari 2 tahun sebelumnya, terdapat peningkatan capaian kinerja, yaitu pada tahun 2022 sebesar 96,17 dan tahun 2023 sebesar 97,47 serta nilai capaian tahun 2024 naik menjadi 98,41.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Secara umum capaian indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) telah tercapai melebihi target yang ditetapkan. Hal ini merupakan upaya seluruh tim di SKIPM Merauke untuk melakukan pemenuhan ketentuan yang menjadi indikator kinerja pelaksanaan anggaran.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya terkait anggaran, karena secara khusus tidak terdapat alokasi anggaran untuk mendukung indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Secara gabungan, terdapat anggaran pada bidang dukungan manajemen internal pada komponen layanan pemantauan dan evaluasi. Selain itu terdapat efisiensi penggunaan sumber daya yaitu dengan dilakukan oleh para pegawai yang berkompeten di bidangnya dalam pencapaian target kinerja serta terdapat pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung capaian kinerja target tersebut.

6. Realisasi Anggaran

Secara khusus tidak terdapat alokasi anggaran untuk mendukung indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Secara gabungan, terdapat anggaran pada bidang dukungan manajemen internal pada komponen layanan pemantauan dan evaluasi.

7. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana aksi yang dilakukan SKIPM Merauke untuk meningkatkan nilai IKPA adalah dengan terus berupaya memenuhi ketentuan kinerja pelaksanaan anggaran berdasarkan indikator pengelolaan uang persediaan, data kontrak, kesalahan SPM, retur SP2D, halaman III DIPA, revisi DIPA, penyelesaian tagihan, rekon LPJ, renkas, realisasi, pagu minus dan dispensasi SPM untuk periode mendatang.

10. IKS. 03.07 Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT SKIPM Merauke

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BPPMHKP merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.

Berdasarkan amanat pasal 23 ayat (5) UUD 1945, Badan Pemeriksa Keuangan bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Kemudian dituangkan lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara jo Pasal 6 ayat (3) UU BPK Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Formula yang dipergunakan untuk melakukan perhitungan indikator kinerja Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT SKIPM Merauke adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi BPK Lingkup UPT Yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Total Rekomendasi BPK Lingkup UPT}} \times 100\%$$

- **Capaian Indikator Kinerja**

Selama tahun 2024 tidak ada audit yang dilaksanakan secara langsung oleh BPK di SKIPM Merauke. Namun telah dilakukan upaya pemenuhan seluruh dokumen serta data dukung sesuai ketentuan secara online. Berdasarkan data BPPMHKP tahun 2024 untuk satuan kerja SKIPM Merauke tidak terdapat temuan BPK. Sehingga capaian indikator kinerja Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT SKIPM Merauke tahun 2024 persentasenya adalah sebesar 100 %. Berikut data target dan realisasi indikator kinerja ini :

Tabel. 20

Target dan Realisasi IKS 03.07 Tahun 2024

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2024						Renstra 2020-2024	
		2019	2020	2021	2022	2023	Realisasi Periode Sebelumnya	Target	Realisasi	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	%
1	Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT SKIPM Merauke / Persen.	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100

- **Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya**

Pada tahun 2023 terdapat capaian indikator kinerja Persentase Penyelesaian Temuan BPK sebesar 100 %. Capaian ini sama dengan periode tahun 2024 melalui indikator kinerja Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT SKIPM Merauke sebesar 100 %.

- **Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra**

Berdasarkan dokumen Renstra terbaru indikator kinerja Penyelesaian Temuan BPK telah memenuhi target sebesar 100 %.

- **Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi**

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya, dimana dalam pencapaian indikator kinerja Penyelesaian Temuan BPK dilaksanakan oleh tim yang telah ditunjuk. Selain itu terdapat efisiensi lainnya, karena indikator kinerja ini secara khusus tidak didukung dengan anggaran yang khusus terkait temuan BPK, namun dapat dikategorikan masuk komponen dukungan manajemen internal pada kegiatan pemantauan dan evaluasi.

- **Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya, dimana dalam pencapaian indikator kinerja Persentase Penyelesaian Temuan BPK dilaksanakan oleh tim yang telah ditunjuk.

- **Realisasi Anggaran**

Pada sisi anggaran indikator kinerja ini dapat dikategorikan masuk pada anggaran gabungan di dukungan manajemen internal, yaitu komponen pemantauan dan evaluasi. Terdapat pagu anggaran sebesar Rp. 47.046.000,- dengan realisasi tahun 2024 mendekati 100 %.

- **Rencana Kegiatan Periode Berikutnya**

Rencana aksi yang telah dilakukan untuk mendukung capaian indikator kinerja Penyelesaian Temuan BPK adalah dengan melakukan pemenuhan seluruh dokumen data dukung atau laporan keuangan sesuai dengan ketentuan, serta meningkatkan koordinasi internal dan eksternal.

11. IKS. 03.08 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT SKIPM Merauke

Pemantauan tindak lanjut sendiri secara khusus bertujuan: 1) melakukan rekonsiliasi data dan informasi pemantauan tindak lanjut temuan Itjen KKP dengan Satker Lingkup Pusat dan UPT 2) menilai kecukupan dan validitas bukti tindak lanjut yang disampaikan (antara lain: surat teguran/sanksi, setoran ke kas negara, dsb), dan 3) memberikan status penyelesaian tindak lanjut temuan Itjen KKP (Tuntas, Proses, Belum Ditindaklanjuti) atas bukti tindak lanjut yang disampaikan. Kepedulian tindak lanjut ini sangat penting mengingat semakin berlarut-larut penyelesaian akan berpotensi masuknya APH. Diperlukan juga peningkatan sistem pengendalian intern di masing-masing Satker sebagai lapis 1 dan 2 dalam *Three Lines of Defense* sehingga temuan tidak terus berulang dan berlarut-larut penyelesaiannya.

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang terbit pada Triwulan IV tahun 2023 s.d Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) yang menjadi objek pengawasan. Nilai Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Lingkup BPPMHKP menggunakan nilai Eselon I BPPMHKP.

Indikator Kinerja Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja, dihitung dengan periode triwulanan dan menggunakan jenis atau pola perhitungan target atau realisasi data nilai posisi akhir. Indikator ini diperoleh berdasarkan data aplikasi SIDAK KKP secara otomatis. Berikut komponen perhitungan unsur serta tampilan gambar aplikasi SIDAK KKP tahun 2024 sebagai berikut :

$$\frac{\sum N_t}{\sum N} \times 100$$

$\sum N_t$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti

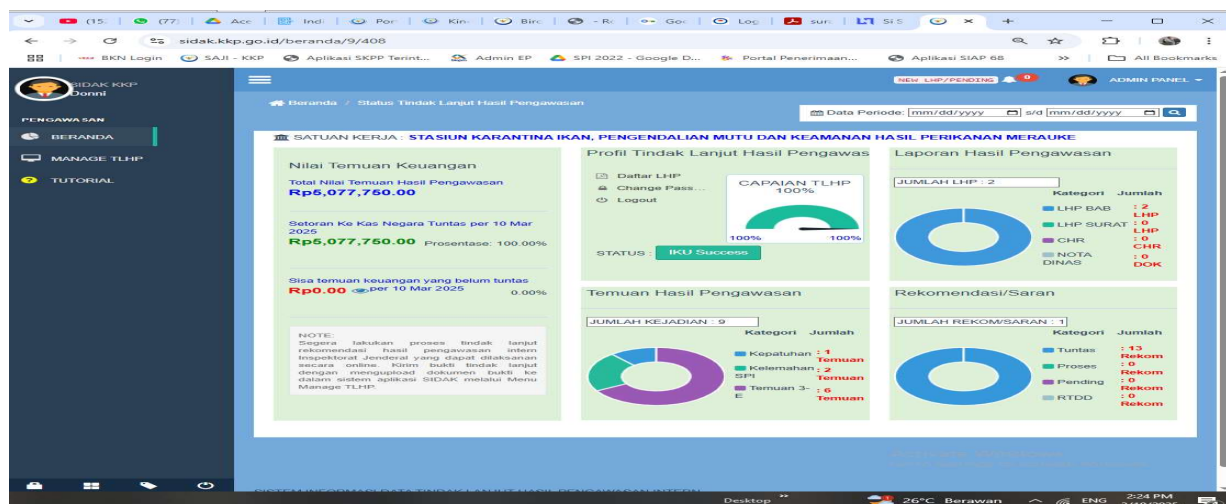
$\sum N$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan

1. Capaian Indikator Kinerja

Pada tahun 2024 SKIPM Merauke menjadi salah satu lokasi pengawasan audit oleh Inspektorat Jenderal KKP. Berdasarkan audit kinerja tersebut, SKIPM Merauke telah berupaya menindaklanjuti hasil temuan audit kinerja. Sampai dengan akhir triwulan IV tahun 2024, seluruh temuan dari pengawasan yang dilaksanakan telah selesai ditindaklanjuti. Berdasarkan data tersebut, capaian nilai TLHP (Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan), indikator kinerja Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja adalah berstatus “SUKSES” dengan capaian sebesar 100 % dari target sebesar 80 %, atau setara dengan 120 %. Data tersebut bisa dilihat dari tampilan pada *dash board* aplikasi SIDAK (<http://sidak.kkp.go.id/login>) yang menjelaskan tindak lanjut hasil pengawasan telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Tampilan tangkap layar aplikasi SIDAK tahun 2024 ditampilkan sebagai berikut.

Gambar. 15

Capture Aplikasi Sidak KKP SKIPM Merauke Tahun 2024



Tabel. 21

Target dan Realisasi IKS 03.08 Tahun 2024

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2024						Renstra 2020-2024	
		2019	2020	2021	2022	2023	Realisasi Periode Sebelumnya	Target	Realisasi	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	%
1	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT SKIPM Merauke / %	-	-	100	100	100	100	80	100	120	80	120	80	120

2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Berdasarkan data indikator kinerja Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja tahun 2023, SKIPM Merauke memiliki capaian kinerja sebesar 100 % dari target sebesar 75 %. Jika dilakukan perbandingan dengan tahun 2024 capaian tersebut terdapat peningkatan berdasarkan tangkapan layar dari portal SIDAK. Nilai capain tahun 2024 tersebut sama jika dibandingkan capaian nilai pada periode sebesar 100 %.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Berdasarkan dokumen Renstra, indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT SKIPM Merauke tahun 2024 telah terdapat capaian melebihi target, dengan efektifitas capaian sebesar 120 %.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Secara umum indikator kinerja Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja telah berhasil dicapai oleh SKIPM Merauke. Terdapat 2 (dua) obyek pengawasan pada tahun 2024, yaitu Audit Kinerja dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh tim Inspektorat Jenderal KKP. Komitmen pimpinan dan seluruh pegawai diperlukan agar seluruh rekomendasi atau saran yang diberikan dan dengan menyampaikan dokumen tindak lanjutnya secara tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang diberikan.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya terkait anggaran, karena secara khusus tidak terdapat alokasi anggaran untuk mendukung indikator kinerja Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja telah berhasil dicapai oleh SKIPM Merauke. Secara gabungan, terdapat anggaran pada bidang dukungan manajemen internal pada komponen layanan pemantauan dan evaluasi.

6. Realisasi Anggaran

Secara khusus tidak terdapat alokasi anggaran untuk mendukung indikator kinerja Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja telah berhasil dicapai oleh SKIPM Merauke.. Secara gabungan, terdapat anggaran pada bidang dukungan manajemen internal pada komponen layanan pemantauan dan evaluasi.

7. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana aksi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator kinerja Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja telah berhasil dicapai oleh SKIPM Merauke adalah dengan melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja yang dilaksanakan setiap periode dan melakukan tindak lanjut pemenuhan dokumen atas rekomendasi Inpektorat Jenderal sesuai dengan ketentuan.

12. IKS. 03.09 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup UPT SKIPM Merauke

Indikator kinerja tingkat kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup SKIPM Merauke adalah suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup SKIPM Merauke. dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat kepatuhan PBJ UPT BPPMHKP diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

- Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%)
- Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%).
- Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%).
- Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).

Pada tahun 2024 indikator kinerja nilai tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa mengalami kenaikan target menjadi sebesar 80 % dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 77,50. Indikator ini memiliki periode pelaporan secara tahunan dan jenis perhitungan data akumulasi akhir.

1. Capaian Indikator Kinerja

Berdasarkan surat dari Inspektorat Jenderal KKP Nomor B.519/ITJ.4/HP.660/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024, perihal Hasil Pengawasan Lainnya dalam rangka Penilaian Efektifitas Pengawasan dan Kepatuhan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Tahun 2024 lingkup BPPMHKP. Penilaian tingkat kepatuhan PBJ lingkup BPPMHKP tahun 2024 adalah sebesar 84,34 %. Nilai tersebut merupakan gambaran kegiatan pengadaan barang/jasa stasiun kerja yang mewakili seluruh unsur yang menjadi parameter penilaian. Secara detail nilai tersebut terdiri dari unsur ketersediaan manajemen resiko sebesar 10 %; perencanaan dan persiapan sebesar 13,75 %; presentase pemilihan penyedia yang dilaksanakan melalui SPSE sebesar 10,00 %; kesesuaian tahap pelaksanaan sebesar 31,84 %; laporan penyelenggaraan PBJ sebesar 3,75 %; serta persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan sebesar 15 %. Capaian indikator kinerja ini

Tabel. 22

Target dan Realisasi IKS 03.09 Tahun 2024

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2024						Renstra 2020-2024	
		2019	2020	2021	2022	2023	Realisasi Periode Sebelumnya	Target	Realisasi	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	%
1	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke / %	-	-	-	76,21	78,26	78,26	80	84,34	105,43	80	105,43	80	105,43

2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Berdasarkan data capaian kinerja indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa pada tahun 2023 dan tahun 2024 terdapat target dan capaian karena sistem perhitungan indikator kinerja dilakukan secara tahunan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Target indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa pada dokumen Renstra adalah sebesar 80. Indikator ini merupakan indikator baru pada tahun 2022, sehingga pada tahun sebelumnya belum ada. Capaian dengan target pada Renstra telah tercapai melebihi target.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Analisa keberhasilan yang dapat mendukung indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa adalah ditentukan oleh adanya komitmen pimpinan dan tim pengadaan barang dan jasa terhadap pelaksanaan kegiatan secara tepat waktu dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya terkait yaitu dengan dilakukan oleh para pegawai yang berkompeten di bidangnya dalam pencapaian target kinerja serta terdapat pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung capaian kinerja target tersebut.

6. Realisasi Anggaran

Secara khusus tidak terdapat alokasi anggaran untuk mendukung indikator kinerja tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa. Secara gabungan, terdapat anggaran pada bidang dukungan manajemen internal pada komponen layanan operasional perkatoran.

7. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana aksi yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya indikator kinerja nilai tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa adalah dengan membuat perencanaan realisasi pengadaan barang dan jasa, serta meningkatkan koordinasi dengan tim internal dan pusat terkait. Pada periode selanjutnya, SKIPM Merauke berupaya untuk terus meningkatkan nilai kepatuhan pengadaan barang/jasa dengan memenuhi ketentuan yang berlaku dan memenuhi seluruh unsur-unsur yang menjadi parameter penilaian.

13. IKS. 03.10 Tingkat Kepatuhan BMN Lingkup UPT SKIPM Merauke

Indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN adalah Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup SKIPM Merauke telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penatausahaan BMN bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN yang meliputi penatausahaan pada pengguna atau kuasa pengguna barang dan pengelola barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup UPT diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2023;
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2023 baik ke pengguna barang dan pengelola barang;
3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2023;
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2023 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST) / Berita Acara Pemakaian;
5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu.

1. Capaian Indikator Kinerja

Pada tahun 2024 indikator nilai tingkat kepatuhan pengelolaan BMN mengalami kenaikan nilai target menjadi 80 % dari tahun sebelumnya sebesar 77,5 %. Berdasarkan surat dari Sekretaris BPPMHKP dengan nomor B.67/BPPMHKP.1/PL.760/1/2025 tanggal 3 Januari 2025, perihal Capaian IKU Tingkat Kepatuhan BMN Lingkup BPPMHKP Tahun 2024, diperoleh nilai tingkat kepatuhan pengelolaan BMN satuan kerja lingkup BPPMHKP Tahun 2024 sebesar 97,50 %, atau setara dengan 120 %.

Tabel. 23

Target dan Realisasi IKS 03.10 Tahun 2024

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2024						Renstra 2020-2024	
		2019	2020	2021	2022	2023	Realisasi Periode Sebelumnya	Target	Realisasi	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	% Capaian
1	Tingkat Kepatuhan BMN Lingkup UPT SKIPM Merauke / %	-	-	-	97,50	96,57	96,57	80	97,50	120	80	120	80	97,50

2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Berdasarkan data capaian kinerja indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup UPT SKIPM Merauke pada tahun 2023 terdapat peningkatan capaian indikator kinerja, yaitu dari sebesar 96,57, menjadi sebesar 97,50 pada tahun 2024.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Target indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN pada dokumen Renstra adalah sebesar 80. Indikator ini merupakan indikator baru pada tahun 2022. Pada tahun 2024 indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup UPT SKIPM Merauke dapat tercapai melebihi target yang telah ditetapkan.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Analisa keberhasilan yang dapat mendukung indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup UPT SKIPM Merauke tahun 2024 adalah ditentukan oleh adanya komitmen pimpinan dan pengelola BMN terhadap pelaksanaan kegiatan secara tepat waktu dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada pelaksanaan indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN dengan pemanfaatan teknologi informasi pada aplikasi SAKTI Modul GLP, Modul Aset Tetap dan Modul Persediaan.

6. Realisasi Anggaran

Pada sisi anggaran indikator kinerja tingkat kepatuhan pengelolaan BMN dapat dikategorikan masuk pada anggaran gabungan di dukungan manajemen internal, yaitu layanan manajemen keuangan. Terdapat pagu anggaran sebesar Rp. 49.276.000,- dengan realisasi sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp. 49.274.190,- atau setara dengan hampir 100 %.

7. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana aksi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator kinerja nilai tingkat kepatuhan pengelolaan BMN adalah dengan melakukan penertiban administrasi BMN dan melakukan inventarisasi BMN secara berkala. Pada periode selanjutnya, SKIPM Merauke berupaya untuk terus meningkatkan nilai kepatuhan pengelolaan BMN dengan memenuhi ketentuan yang berlaku dan memenuhi seluruh unsur-unsur yang menjadi parameter penilaian. Berikut data target dan realisasi indikator kinerja tersebut.

3.1. Analisis dan Evaluasi

Internal Process Perspective

Sasaran Strategis 1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif menjadi tolok ukur dari dampak keberhasilan program dan kegiatan Stasiun KIPM Merauke. Nilai sasaran strategis ini pada Tahun 2024 adalah sebesar 115,68 %. Nilai ini diperoleh dari rata-rata pencapaian 7 (enam belas) indikator kinerja yakni :

- 1) Jumlah Sertifikat CPIB Suplier Yang Diterbitkan (Sertifikat);
- 2) Pengawasan mutu hasil perikanan domestik lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke (Lokasi);
- 3) UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke (UPI);
- 4) Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik Di UPT UPT BPPMHKP Merauke (Nilai);
- 5) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPMHKP Merauke (%);
- 6) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BPPMHKP Merauke (Nilai);
- 7) Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BPPMHKP Merauke (Nilai);

Beberapa hal yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian indikator ini antara lain :

- Focus Group Discussion (FGD) Kandungan Formaldehid pada Pangan Segar Asal Ikan yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2024 secara offline di Merauke. Kegiatan dihadiri oleh 24 orang peserta yang berasal dari lintas Kementerian / Institusi (BPOM, Desperindag, Dinas Kabupaten, Penyuluh Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan,, Pertanian dan Kelautan Propinsi Papua Selatan dan Universitas Musamus Merauke) serta internal SKIPM Merauke. Kegiatan dibuka oleh Koordinator Surveilans dan Sertifikasi Produk, dan dilanjutkan dengan Rapat Pembentukan Tim Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di Sentra Penyedia Pangan Sehat di Kabupaten Merauke Tahun 2024.





BAB IV

P E N U T U P

Pengukuran capaian kinerja di Stasiun KIPM Merauke dilakukan terhadap 2 Sasaran Strategis dan 25 Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan. Secara umum, pencapaian target indikator Stasiun KIPM Merauke telah sesuai dengan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja pada Tahun 2024 seluruh target telah tercapai dengan baik, bahkan ada beberapa IKU capaiannya melebihi target. Namun demikian tetap diperlukan upaya dan dukungan, baik internal maupun eksternal untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan pendukung indikator agar target kinerja pada Triwulan berikutnya dapat tercapai seluruhnya dan lebih baik lagi.